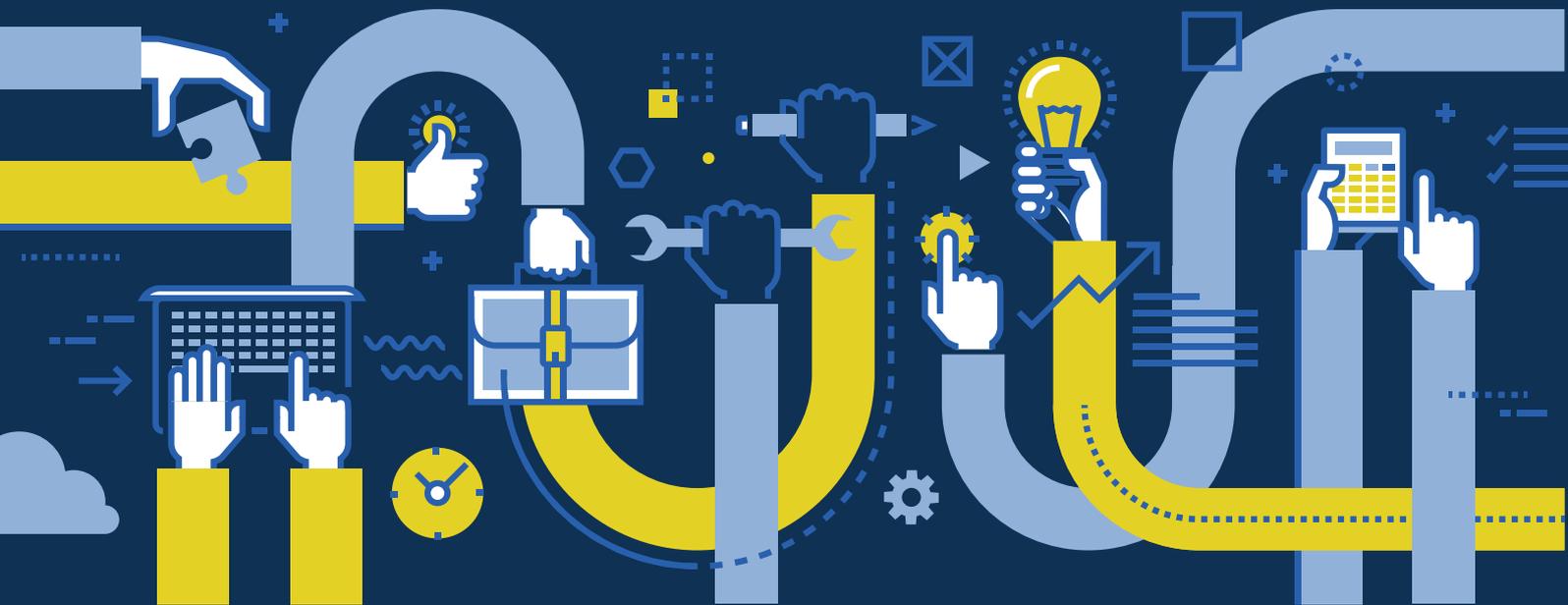


Panduan Optimalisasi Peran

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

2021



Panduan Optimalisasi Peran

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

2021

PANDUAN OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

PENGARAH

Dr. Adi Suryanto, M.Si (Kepala LAN)

TIM PENULIS:

Agit Kristiana, S.AP. (LAN)

Aldhino Niki Mancera, S.IP. (LAN)

Indri Dwi Apriliyanti, Ph.D. (UGM)

Media Wahyudi Askar, Ph.D. (UGM)

ISBN 978-602-52334-5-6 (PDF)

TIM REVIEWER:

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (KASN, UGM)

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. (UGM)

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A. (LAN)

Dra. Elly Fatimah, M.Si. (LAN)

TIM OBSERVER

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm. (LAN)

Dr. Suwatin (LAN)

Widhi Novianto, S.Sos., M.Si. (LAN)

Yogi Suwarno, SIP, MA, Ph.D (LAN)

Dr. Rachael Diprose (University of Melbourne)

TIM INFOGRAFIS:

Tita Adelia, S.IP., M.Sc.

Purwa Rahmanto, S.IP.

PENYUNTING:

Dr. Budiati Prasetiamartati, S.T., M.A

Idha Saraswati

DESAIN SAMPUL:

Purwa Rahmanto, S.IP.

DIDUKUNG OLEH:

Knowledge Sector Initiative

PENERBIT:

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

REDAKSI:

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp: +6221 3868201-5

Fax: +6221 3800187

Email: pusaka@lan.go.id

Cetakan pertama, Januari 2021



SAMBUTAN

Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya arus *disruptive economy*. Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintahan di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kapasitas Analisis Kebijakan, LAN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan menyusun Panduan Optimalisasi Peran JFAK untuk dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengoptimalkan peran Analisis Kebijakan di setiap instansi. Ketersediaan Panduan Optimalisasi Peran JFAK menjadi sangat penting untuk membangun pengetahuan para *stakeholder* terhadap eksistensi JFAK dan peran-peran potensial yang dapat dilakukan oleh para Analisis Kebijakan di lingkungannya. Melalui fungsi pembinaan yang dilakukan LAN, ke depan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini dapat menjadi salah satu media pembinaan untuk mendorong peran aktif Analisis Kebijakan sebagai *think tank* kebijakan publik di Indonesia dengan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan sesuai bidang keahliannya.

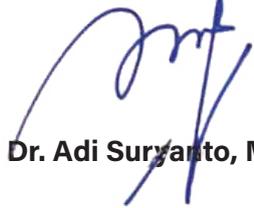
Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras Tim Penulis hingga berhasil menyelesaikan seluruh proses penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK selama masa pandemi COVID-19 dengan dukungan yang baik dari *Knowledge Sector Initiative*. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif memberikan sumbangsih gagasan, masukan, dan saran dalam proses penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK. Tak lupa, terima kasih dan apresiasi kepada mitra kerja kami di *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Pemerintah Australia dan *Knowledge Sector Initiative* yang secara aktif telah mendukung LAN dalam membangun JFAK dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam meningkatkan kualitas JFAK. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada mitra kerja kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini.

Semoga dengan terbitnya Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini dapat mendorong peran analisis kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memperkuat ekosistem pengetahuan yang selaras dengan upaya membangun kualitas kebijakan yang lebih baik di Indonesia. Analisis Kebijakan kompeten Indonesia Maju!

Jakarta, Januari 2021

Kepala

Lembaga Administrasi Negara



Dr. Adi Suryanto, M.Si.



SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan eksistensi jabatan fungsional dalam birokrasi. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas Jabatan Fungsional (JF) sebagai kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi tertentu. Lebih lanjut, JF menjadi pilihan karier utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diisi baik oleh PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dapat memegang peranan di setiap lini organisasi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat ini juga telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Semangat dari PP ini adalah untuk meningkatkan kualitas jabatan fungsional di dalam birokrasi dan mendorong ASN untuk masuk ke dalam jabatan fungsional dengan mekanisme yang lebih sederhana.

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikan periode kedua semakin memberi perhatian terhadap penguatan JF di dalam birokrasi. Salah satu filosofi dari 5 (lima) agenda kerja kabinet yaitu penyederhanaan birokrasi yang dilakukan besar-besaran untuk memangkas prosedur birokrasi yang panjang dan menyederhanakan sistem eselon birokrasi. Presiden Joko Widodo meminta penyederhanaan eselon menjadi 2 (dua) level dan menggantinya dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) telah merespons arahan Presiden tersebut dengan menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan kebijakan ini, ASN yang saat ini duduk dalam jabatan administrasi (administrator/eselon III, pengawas/eselon IV, dan pelaksana/eselon V) yang masuk dalam kriteria penyederhanaan dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang relevan.

Adanya dinamika kebijakan dalam tata kelola jabatan fungsional ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh instansi pembina jabatan fungsional. Tak terkecuali bagi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang termasuk salah satu instansi pembina jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. Peran LAN sebagai instansi pembina akan semakin strategis untuk meningkatkan kualitas ASN di seluruh Indonesia melalui peran pembinaan jabatan fungsionalnya yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) merupakan salah satu jabatan fungsional yang strategis dan sangat menarik minat ASN saat ini pasca terbitnya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Saya mengapresiasi adanya Panduan Optimalisasi Peran JFAK yang diterbitkan oleh LAN ini. Melalui panduan ini diharapkan dapat terbangun pemahaman yang baik dan komprehensif tentang JFAK dan peran-peran yang seharusnya dilakukan, baik oleh pemangku JFAK, pimpinan instansi, maupun para pengelola kepegawaian di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. JFAK yang notabene diberikan kewenangan untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan pemerintah akan memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik di setiap instansi pemerintah. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2021

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo, S.H.



SAMBUTAN TIM REVIEWER

Kebijakan publik menjadi instrumen bagi negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tantangan kebijakan di aras global kini semakin kompleks, penuh ketidakpastian, dan menghadapi kecepatan perubahan teknologi yang menakjubkan. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan publik memerlukan sumberdaya yang berkompoten untuk mengawal proses dari *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publiknya. Semangat untuk mendorong terciptanya pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) yang terus mengemuka di berbagai forum kebijakan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mampu membangun sumber daya manusia unggul di bidang analisis kebijakan publik.

Ada banyak sekali pertanyaan yang menjadi diskursus dalam tataran praktis tentang strategi peningkatan kualitas kebijakan publik. Adanya peran analisis di dalam institusi pemerintahan termasuk salah satu diskursus yang mengemuka di dalamnya. Penguatan profesi analisis kebijakan di lingkungan organisasi pemerintahan di Indonesia diharapkan dapat mendorong terciptanya proses deliberatif dalam proses kebijakan. Lahirnya jabatan fungsional analisis kebijakan juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Kehadiran analisis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang ada selama ini bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elite.

Pengembangan profesi analisis kebijakan harus dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan yang didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan profesi tidak hanya secara formal tetapi melalui mekanisme-mekanisme informal. Saya berharap agar eksistensi analisis kebijakan semakin terlihat dari waktu ke waktu, baik dari segi kualitas produk kerja maupun jejaring kerjanya. Dengan semakin berkembangnya jumlah analisis kebijakan, Lembaga Administrasi Negara perlu bersinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pembinaan profesi analisis kebijakan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan *think tank* kebijakan perlu terus dibangun.

Saya mewakili Tim Reviewer menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara, Tim Penulis dan para mitra kerjanya yang terlibat aktif dalam penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan kolega saya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Pemerintah Australia melalui

Knowledge Sector Initiative (KSI) yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan sehingga dapat membangun energi positif dalam meningkatkan kualitas para analis kebijakan dan kebijakan publik di Indonesia.

Secara umum isi panduan ini sudah lengkap dan sangat baik. Panduan ini juga mudah dipahami, disajikan dengan cara yang menarik, dan dapat membantu para pihak yang berhubungan dengan para Analis Kebijakan. Semoga informasi yang diberikan dalam Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini ini bermanfaat bagi seluruh pimpinan instansi analis kebijakan, para pemangku fungsional analis kebijakan, dan para *stakeholder* JFAK di seluruh Indonesia. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2021

Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara



Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	v
Sambutan Tim Reviewer	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xii
1. Pendahuluan	1
2. Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di Dalam Organisasi	2
2.1 Pendahuluan	2
2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi	2
2.2.1 Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Pusat	2
2.2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah	3
3. Peran JFAK dan Kolaborasi Antar-JF di dalam Organisasi	4
3.1 Pendahuluan	4
3.2 Profil JFAK	4
3.3 Kolaborasi Kerja JFAK dan Jabatan Fungsional yang lain	5
Relasi dan Kolaborasi Kerja JFAK dan JF yang lain	6
Contoh Relasi Kerja JFAK dan JF yang lain	7
3.4 Praktik Baik Kolaborasi JFAK dan Jabatan Fungsional yang lain	8
4. Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan	9
4.1 Pendahuluan	9
4.2 Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan	9
4.3 Praktik Baik Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan	10

5. Jenis Pekerjaan JFAK	13
5.1 Pendahuluan	13
5.2 Jenis Pekerjaan JFAK	13
5.3 Proses Kerja JFAK	14
6. Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan JFAK di dalam Organisasi	15
6.1 Pendahuluan	15
6.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i>	16
6.2.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Pusat	16
6.2.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Pusat	16
6.2.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Pusat	17
6.2.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Daerah	17
6.2.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Daerah	18
6.2.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan <i>Ad Hoc</i> di Pemerintah Daerah	20
6.3. Peta Proses JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK	22
6.3.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat	22
6.3.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat	22
6.3.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat	23
6.3.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah	24
6.3.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah	24
6.3.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah	26

7. Satuan Hasil Kerja JFAK	28
7.1 Pendahuluan	28
7.2 Standar Kompetensi JFAK	28
7.3 Satuan Hasil Kerja JFAK.....	29
8. Evaluasi Kinerja JFAK.....	30
8.1 Pendahuluan	30
8.2 Proses Evaluasi Kinerja JFAK.....	30
8.3 Indikator Penilaian Kualitas Kerja JFAK	31
8.4 Pola Karier JFAK.....	31
8.5 Pemantauan dan Evaluasi Dampak Kebijakan (<i>Policy Tracking</i>)	32
9. Pengembangan Kompetensi JFAK.....	33
9.1 Pendahuluan	33
9.2 Pengembangan Kompetensi JFAK.....	34
9.3 Praktik Baik Pengembangan Kompetensi JFAK	36
10. Penutup.....	39
Appendix.....	40

DAFTAR SINGKATAN

AAKI	Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
AK	Analisis Kebijakan
ASN	Aparatur Sipil Negara
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
Bimtek	Bimbingan Teknis
BKF	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
Diklat	Pendidikan dan pelatihan
DUPAK	Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
FGD	<i>Focused Group Discussion</i>
JA	Jabatan Administrasi
JF	Jabatan Fungsional
JFAK	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
JPT	Jabatan Pimpinan Tinggi
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknis
K/L/D	Kementerian/Lembaga/Daerah

KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAN	Lembaga Administrasi Negara
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PADK	Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
PAK	Penetapan Angka Kredit
Pemda	Pemerintah Daerah
Dikjartih	Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PUSAKA	Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
RKU	Rencana Kerja Unit
RPMen	Rancangan Peraturan Menteri
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RPPres	Rancangan Peraturan Presiden
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia

SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
TPD	Tim Penilai Daerah
TPI	Tim Penilai Instansi
TPP	Tim Penilai Pusat
UGM	Universitas Gadjah Mada

1

Pendahuluan

TUJUAN

Umum: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat, namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan *living document* yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan pembinaan JFAK.

Khusus: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan.

Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa bab yang berisi antara lain:



1. Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di dalam Organisasi



5. Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JFAK di dalam Organisasi



2. Peran JFAK dan Kolaborasi Antar JF di dalam Organisasi



6. Standar Kompetensi dan Satuan Hasil Kerja JFAK



3. Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan



7. Evaluasi Kinerja JFAK



4. Jenis Pekerjaan JFAK



8. Pengembangan Kompetensi JFAK

SASARAN PEMBACA



Atasan Langsung
JFAK



Pejabat
Pengelola Kepegawaian



JFAK

Selamat membaca!

2

Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di Dalam Organisasi

2.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

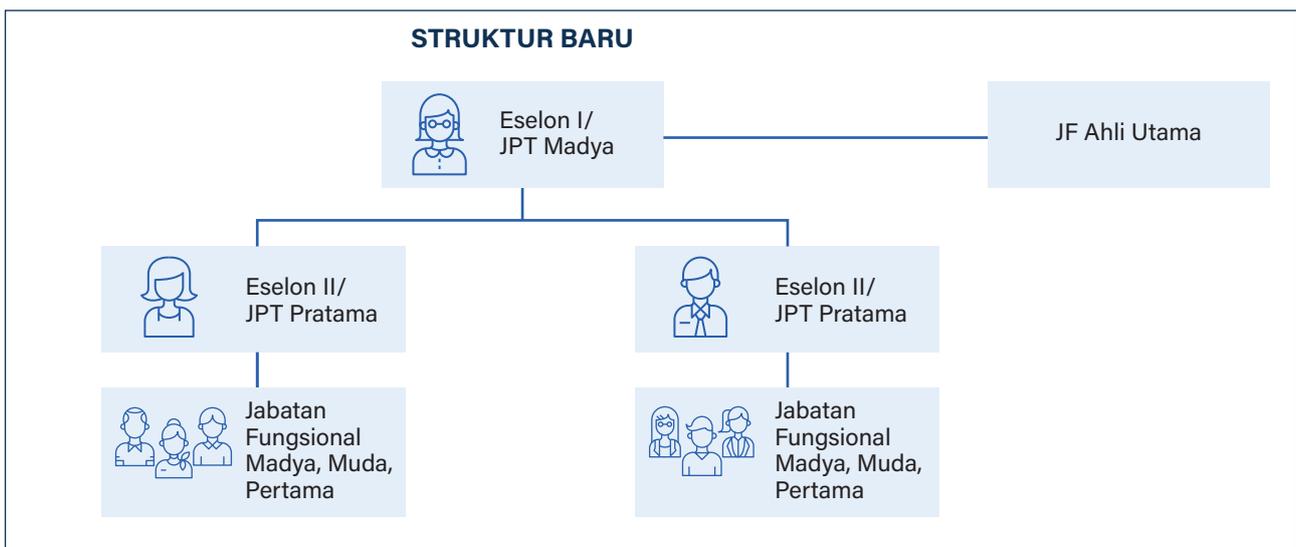
- a. Memahami kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan kelompok JF di organisasi pemerintah yang telah disederhanakan
- b. Memahami kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi baik di organisasi pemerintah pusat maupun daerah



Catatan: struktur organisasi pemerintah yang ditampilkan pada bab ini mengikuti hasil pembahasan terbaru terkait perencanaan penyederhanaan struktur birokrasi. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintah dapat berubah sesuai dengan arah pembahasan yang akan datang.

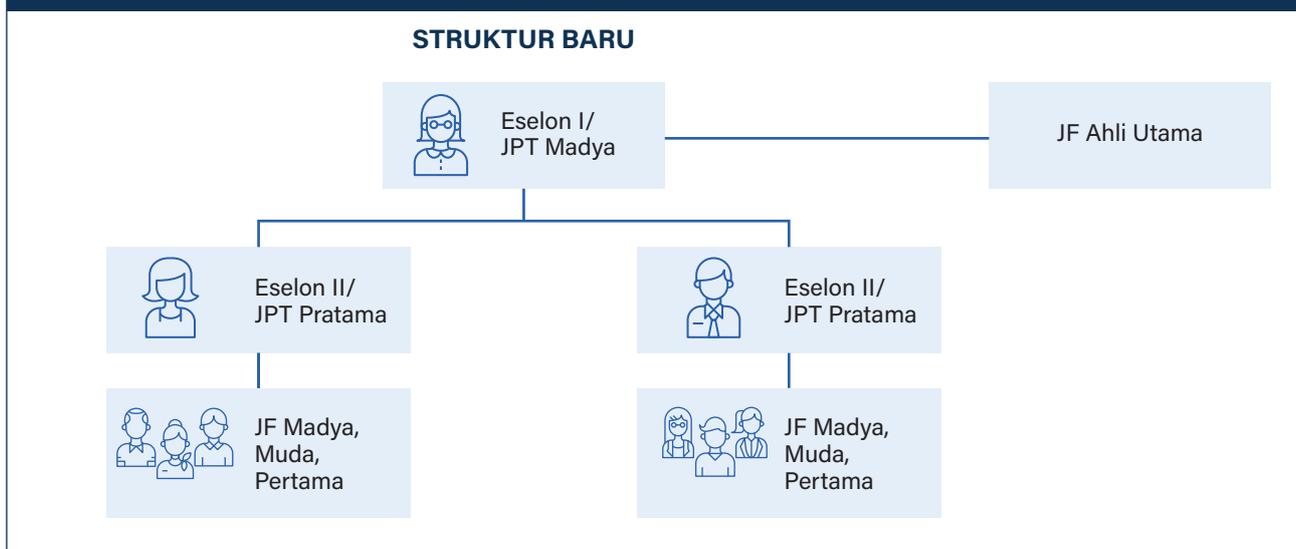
2.2 KEDUDUKAN JF TERHADAP JPT DAN JABATAN ADMINISTRASI

2.2.1 Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Pusat

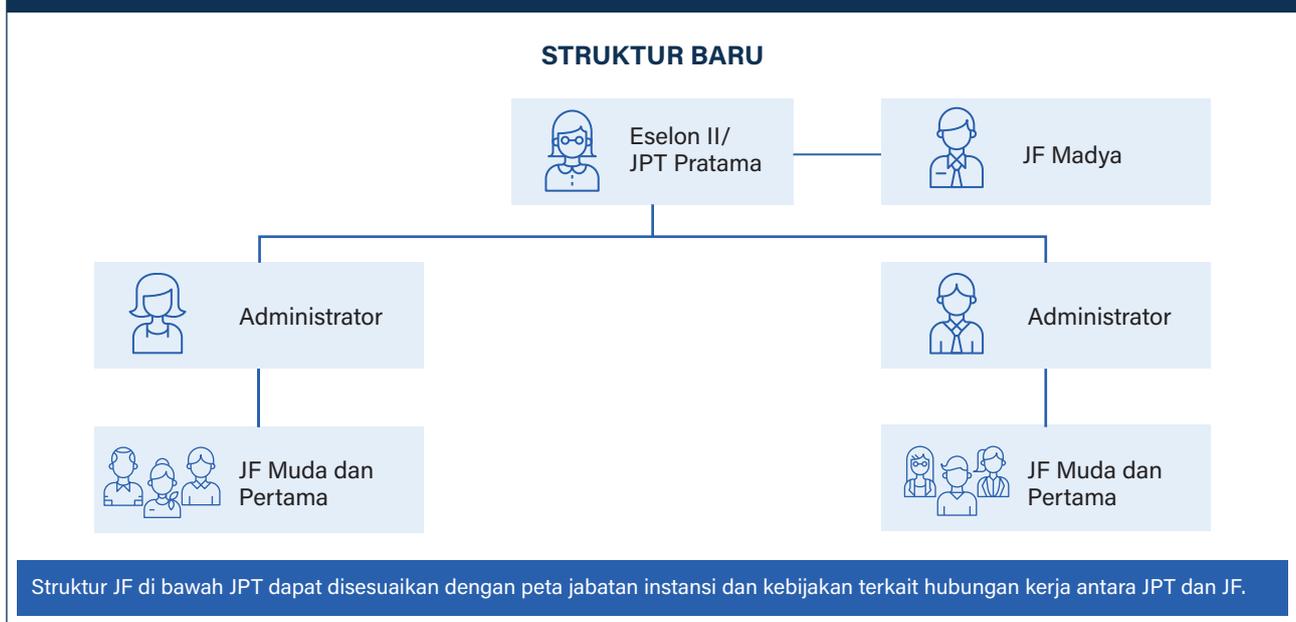


2.2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah

Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Daerah (Provinsi)



Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)



3

Peran JFAK dan Kolaborasi Antar-JF di dalam Organisasi

3.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

- Memahami peran JFAK dalam organisasi
- Memahami kolaborasi kerja JFAK dengan JF yang lain
- Memberikan contoh praktik baik kolaborasi kerja JFAK dengan JF yang lain

3.2 PROFIL JFAK



Mengapa diperlukan analisis kebijakan?

Perkembangan masalah publik kini semakin kompleks dan masif, sehingga membutuhkan berbagai alternatif solusi yang inovatif, solutif serta cepat agar tidak kehilangan momentum dalam penyelesaian masalah. Analisis Kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, *agile*, dan berbasis bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik.



Saran agar analisis kebijakan dapat berperan optimal

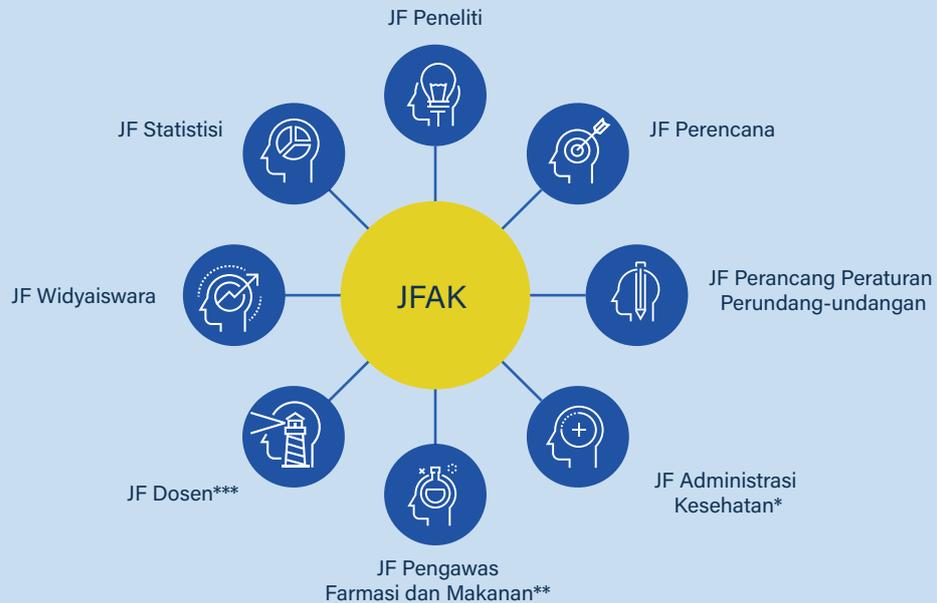
- Pahami tugas dan fungsi (gali informasi pada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh instansi pembina)
- Temu kenali kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan oleh instansi
- Kembangkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dan kebutuhan organisasi/pimpinan
- Membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain (JF/JA/pemangku kepentingan terkait)

3.3 KOLABORASI KERJA JFAK DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG LAIN



Dengan siapa Analisis Kebijakan dapat berkolaborasi?

Dalam memenuhi tugasnya, Analisis Kebijakan berpotensi melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya, terutama JF yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Gambar di bawah adalah beberapa contoh JF yang selama ini sering kali berkolaborasi dengan JFAK pada beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.



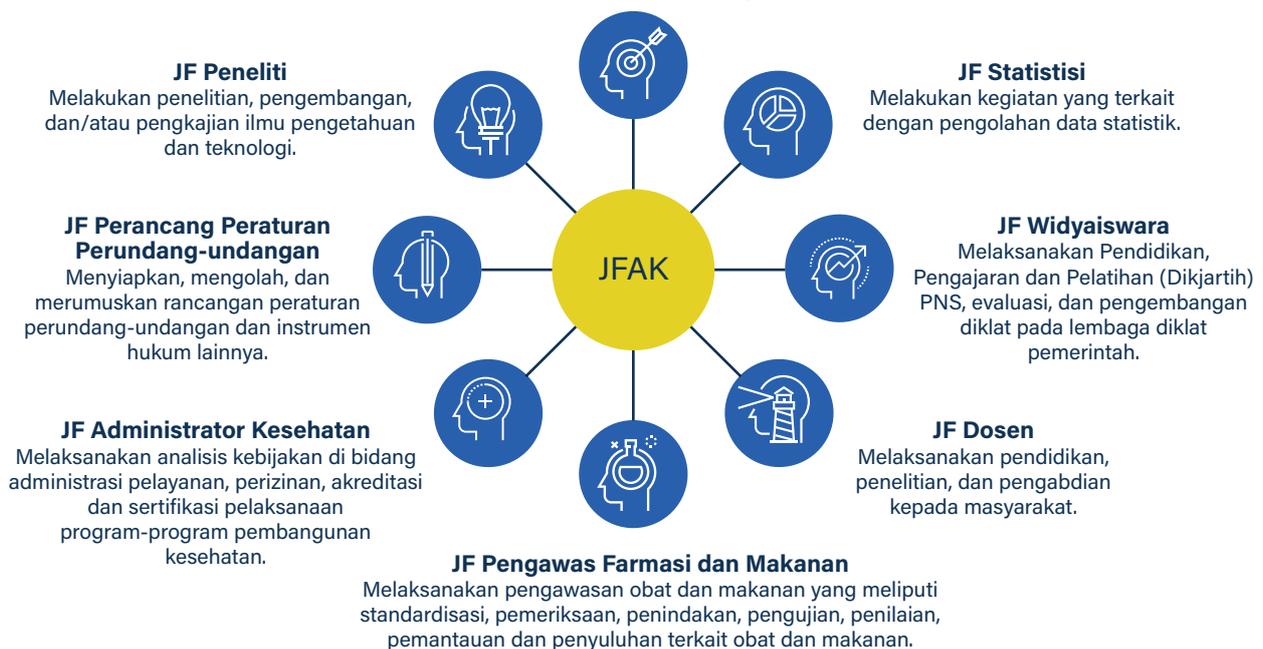
*JF Administrasi Kesehatan yang berada di Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan JFAK dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan

**JF Pengawas Farmasi dan Makanan yang berada di BPOM berkolaborasi dengan JFAK dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan

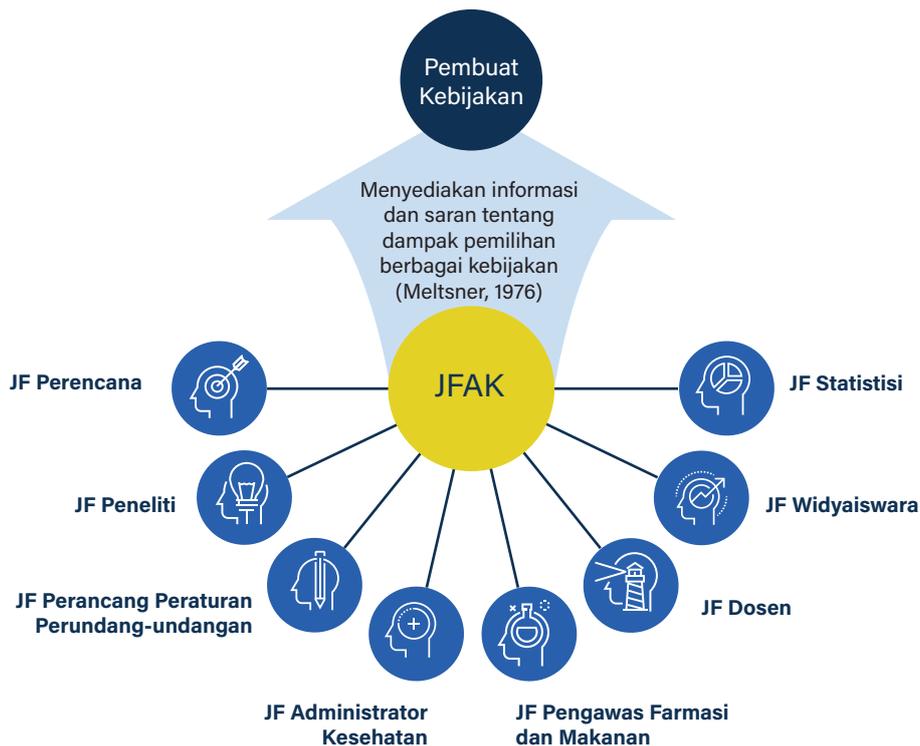
***JF Dosen pada kampus terdekat berkolaborasi dengan JFAK yang berada di Balitbang Kabupaten Badung dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan

JF Perencana

Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Relasi dan Kolaborasi Kerja JFAK dan JF yang lain



Dalam proses pembuatan kebijakan, ruang kolaborasi yang dibangun antara JFAK dengan JF yang lain sangat fleksibel dan cair. Masing-masing JF (JFAK dan JF lainnya) memang memiliki peran dan tugas yang telah ditentukan oleh aturan perundangan, tetapi dapat saling mengisi untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengisi ruang fleksibilitas tersebut, pola kerja perlu dibuat sangat cair. Untuk itu, pimpinan berperan sentral dalam melakukan pembagian pekerjaan. Pada praktiknya, pembagian tugas ini terdapat dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan *cascading* dari tugas dan fungsi/RKU unit organisasi.

Salah satu contoh kolaborasi antar JF yang fleksibel dan cair adalah dalam bentuk *task force* di mana jenis pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama dari proses analisis hingga menyediakan rekomendasi kebijakan.



Peran Atasan Langsung

- Untuk dapat mengisi ruang fleksibilitas tersebut, pimpinan/atasan langsung sangatlah berperan terutama dalam menurunkan pekerjaan dan membaginya (melakukan *cascading*). Agar bisa melakukan peran ini dengan baik, pimpinan perlu memahami tugas dan kompetensi para JF.
- Menciptakan peluang kolaborasi bagi JFAK dengan JF yang lain sesuai dengan kebutuhan dan konteks penugasan yang diberikan.



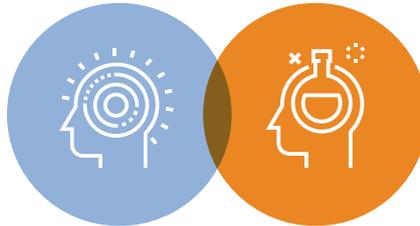
Peran Analisis Kebijakan

- Analisis kebijakan perlu mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan JA ataupun JF terkait. Kolaborasi ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
- Analisis kebijakan perlu memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan, minat, serta kompetensinya.

Contoh Relasi Kerja JFAK dan JF yang lain

Contoh Hubungan JFAK dengan Peneliti

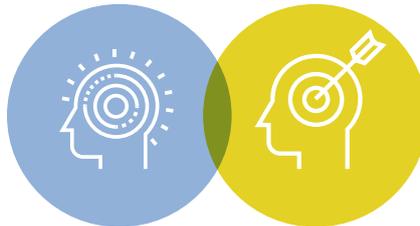
Peneliti dan JFAK berkolaborasi melakukan pengumpulan data dan informasi, berproses melakukan penelitian hingga menghasilkan sebuah penelitian yang utuh, dan melakukan analisis kebijakan hingga menghasilkan dokumen saran kebijakan.



Untuk proses advokasi atas saran kebijakan yang sudah dihasilkan bersama (JFAK dan peneliti) selanjutnya akan dilakukan oleh JFAK. Proses ini merupakan proses politis yang berujung pada pengambilan kebijakan oleh *decision maker*.

Contoh Hubungan JFAK dengan Perencana

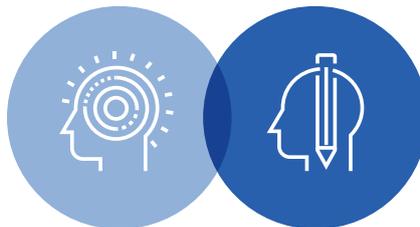
JFAK dan perencana berkolaborasi bersama untuk membuat analisis atas masalah kebijakan yang nantinya dapat ditindaklanjuti menjadi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, ataupun yang dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kegiatan.



Kolaborasi bertujuan agar nantinya program/kegiatan ataupun dokumen perencanaan pembangunan lebih implementatif dan berbasis bukti.

Contoh Hubungan JFAK dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan

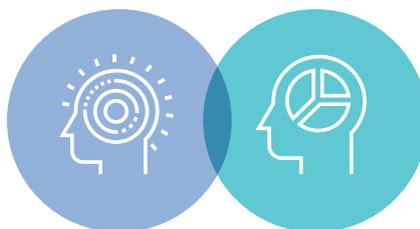
JFAK dan perancang peraturan perundang-undangan dapat berkolaborasi dalam penyusunan produk-produk aturan perundangan. Dimana JFAK sebelumnya telah menyusun kajian atas kebijakan yang ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen aturan perundangan.



Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari dokumen aturan perundangan, agar tetap sesuai dengan substansi yang telah disepakati dalam kajian/dokumen saran kebijakan.

Contoh Hubungan JFAK dengan Statistisi

JFAK dan statistisi bisa berkolaborasi dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan analisis kebijakan. Data-data yang diolah bersama statistisi itu menjadi kebutuhan penting dalam menyusun kebijakan berbasis bukti.



Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengumpulan data dan bukti yang mendukung proses analisis kebijakan.

3.4 PRAKTIK BAIK KOLABORASI JFAK DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG LAIN



Praktik Baik

Penyusunan kebijakan terkait pengembangan kompetensi ASN diawali dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Kajian yang menghasilkan dokumen Laporan Kajian *Grand Design* Pengembangan Kompetensi ASN. Laporan ini kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Analis Kebijakan di Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Lembaga Administrasi Negara) untuk menghasilkan dokumen Pedoman Pengembangan Kompetensi. Pedoman ini menjadi dasar dalam penyusunan Perka LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dengan melibatkan JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan.



Praktik Baik

Badan Kebijakan Fiskal membuat pemetaan tugas dan fungsi dari peneliti dan analis kebijakan untuk mengarahkan proses kolaborasi dari peneliti dan analis kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Lingkup tugas JF Peneliti meliputi pemberian masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan, evaluasi kebijakan untuk jangka yang lebih panjang dan pengusulan isu-isu. Sedangkan lingkup tugas JF Analis Kebijakan meliputi penyusunan kajian dan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan.



4

Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan

4.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

- Memahami peran JFAK dalam siklus kebijakan, mulai dari fase *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan
- Memahami bahwa JFAK memiliki ruang untuk menginisiasi penyusunan analisis kebijakan sehingga tidak hanya bersandar pada penugasan yang diberikan oleh atasan
- Memberikan contoh praktik baik terkait peran JFAK dalam siklus kebijakan baik di pemerintah pusat maupun daerah

4.2 PERAN JFAK DI DALAM SIKLUS KEBIJAKAN



4.3 PRAKTIK BAIK PERAN JFAK DI DALAM SIKLUS KEBIJAKAN



1. AGENDA SETTING

PERUMUSAN ISU

JFAK dapat merumuskan suatu permasalahan kebijakan dengan data dari beragam sumber, misalnya, kajian dari *World Bank*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), atau organisasi lainnya. Dalam proses analisis permasalahan kebijakan, JFAK dapat menggali data melalui diskusi maupun diskusi kelompok terarah dengan organisasi yang melakukan kajian tersebut. Jika yang dibahas adalah isu strategis, diskusi diawali dengan pertemuan antar-pimpinan organisasi. Praktik baik ini tidak hanya ditemukan di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tetapi juga di instansi lainnya.

Setelah analisis permasalahan kebijakan selesai dilakukan dan disetujui oleh atasan langsung, JFAK diminta untuk melakukan advokasi ke instansi yang terkait. Advokasi dilakukan ketika permasalahan kebijakan beririsan dengan kewenangan dan tanggung jawab instansi lainnya.



2. FORMULASI KEBIJAKAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

Dalam penyusunan kebijakan terkait pembinaan JF di Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, setelah melakukan pemetaan masalah, JFAK dilibatkan untuk merumuskan rancangan kebijakan dengan beragam metode antara lain studi literatur, diskusi kelompok terarah maupun *benchmark*. Dalam proses ini, JFAK diharapkan dapat menawarkan substansi yang bisa menjadi kerangka kebijakan. Dalam menyusun kebijakan tentang standar kompetensi dan sertifikasi profesi, misalnya, para JFAK menyusun *policy brief* hingga menjadi sebuah rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan ini dikonsultasikan dengan pimpinan secara internal kemudian diperbaiki sesuai arahan pimpinan. Rancangan kebijakan yang telah dibahas secara internal itu kemudian dikonsultasikan dengan pihak eksternal, baik dari unit lintas kedeputian maupun dengan instansi atau pihak eksternal lainnya. JFAK diberi ruang untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya dalam proses perumusan kebijakan dan dilibatkan secara aktif dalam konsultasi publik terhadap rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan tersebut kemudian ditetapkan menjadi sebuah peraturan baik Peraturan LAN atau peraturan perundang-undangan lainnya.



BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) KEMENTERIAN KEUANGAN

JFAK melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) yang merupakan dokumen tahunan sebagai narasi awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai *aggregate control* kebijakan fiskal. Dalam proses analisis ini, terdapat tim kerja yang secara intensif melakukan proses diskusi, analisis, dan penyusunan kajian. Hasilnya disampaikan ke rapat pimpinan di Kemenkeu untuk diuji dan diberikan arahan. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga dieskalasi di level sidang kabinet.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) KABUPATEN BADUNG

JFAK membantu pemerintah daerah merevisi rentang usia kelompok sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Jika sebelumnya kriteria penerima bantuan sosial lebih longgar, analisis yang dilakukan JFAK merekomendasikan bahwa seharusnya kelompok lansialah yang menjadi penerima bantuan sosial tersebut. Revisi kelompok sasaran dalam kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi anggaran.



PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN

Di masa awal pandemi COVID-19, terdapat surat edaran yang meminta fasilitas kesehatan memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya ke fasilitas kesehatan lain. Namun, beberapa penelitian di negara-negara barat menunjukkan bahwa jika fasilitas kesehatan ditutup dalam waktu enam bulan, angka kematian beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria akan meningkat sebesar 30 persen. Ini belum ditambah dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker dan diabetes melitus yang memerlukan pengobatan rutin. Berdasar pada data tersebut, JFAK membuat analisis yang keluarannya berupa *policy paper* dan telaah staf. Akhirnya kebijakan diubah dan dikeluarkan dua pedoman bagi fasilitas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan di masa COVID-19 dengan bantuan anggaran dari pemerintah. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan RS menghadapi kasus COVID-19 dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.

Advokasi kebijakan dalam agenda setting (JFAK mengadvokasi isu yang dianggap penting untuk masuk dalam agenda perumusan kebijakan)



PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN

JFAK menulis artikel di media massa yang isinya menganjurkan pentingnya fasilitas kesehatan untuk tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya. Namun, fasilitas kesehatan tersebut harus mengikuti beragam ketentuan di masa pandemi seperti penggunaan zonasi dalam pelayanan, diberlakukannya sistem *shift* dalam pemberian pelayanan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan kepatuhan pada protokol kesehatan.

Desain kebijakan (JFAK dapat memberikan analisis yang digunakan untuk mendesain implementasi kebijakan)



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) KABUPATEN BADUNG

JFAK membuat analisis atas desain pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial lansia di lapangan. JFAK tersebut bekerja sama dengan akademisi, Bappeda, Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik.

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN

JFAK tergabung dalam sebuah tim yang bertugas melakukan analisis terkait perkembangan kasus COVID-19 serta kebutuhan logistik laboratorium dan rumah sakit. Hasil analisis tersebut digunakan oleh atasan (eselon 2) untuk menyusun bahan rapat koordinasi Komite Penanggulangan COVID-19.

4. EVALUASI KEBIJAKAN



PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN

JFAK memberikan masukan atas pelaksanaan beragam kebijakan. Sebagai contoh, JFAK mengevaluasi implementasi Permenkes No 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Berdasarkan analisis tersebut, satuan kerja (satker) terkait merencanakan revisi Permenkes. Kedua, JFAK memberi masukan terkait label pada produk makanan yang tidak tersosialisasi dengan baik pada masyarakat sehingga asupan makanan sesuai kebutuhan gizi kurang dipahami. Masukan ini ditindaklanjuti oleh satker terkait dengan melakukan *workshop* tentang label makanan (meskipun masih di kalangan internal Kemenkes).

5

Jenis Pekerjaan JFAK

5.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

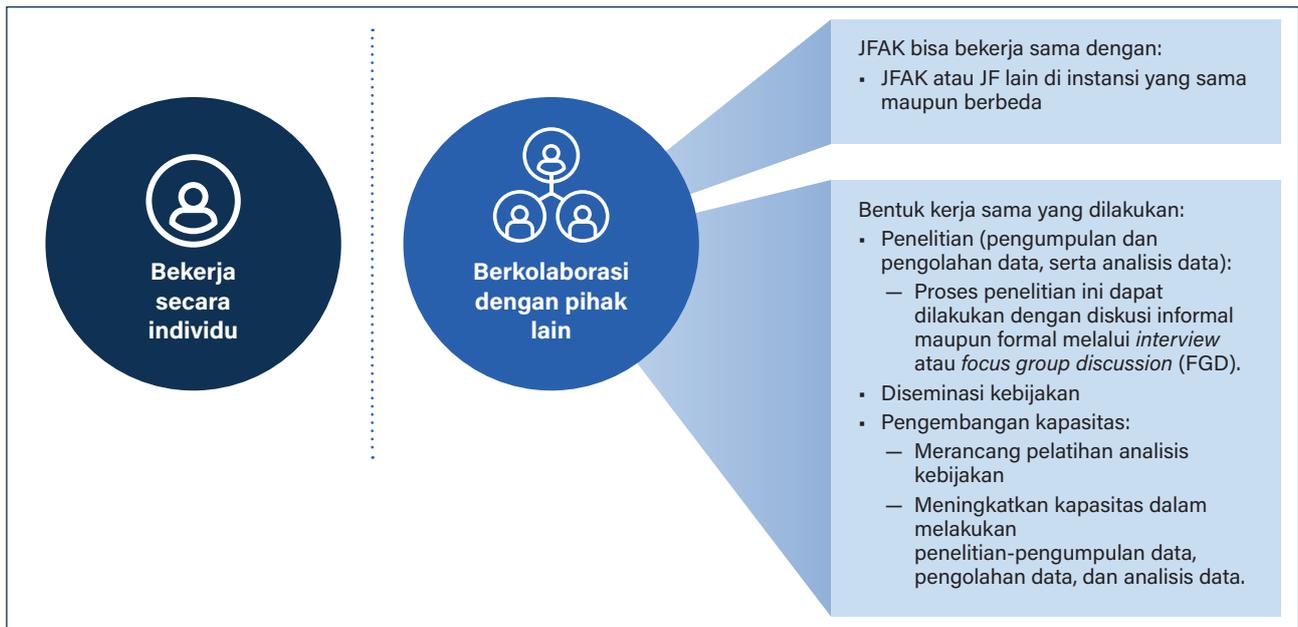
- Memahami tiga jenis pekerjaan JFAK (pelaksanaan RKU, pekerjaan *ad hoc* atau tugas tambahan untuk kebutuhan tertentu, dan pekerjaan mandiri berbasis inisiatif)
- Mengenal proses kerja JFAK dalam menyusun analisis kebijakan

5.2 JENIS PEKERJAAN JFAK

	Rencana Kerja Unit (RKU)	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan program kerja tahunan unit kerja
	Tugas Tambahan (bersifat <i>ad hoc</i>)	<ul style="list-style-type: none">Pertimbangan bahan kajian dan analisis kebijakanAnalisis atau kajian atas isu-isu strategisBahan pidatoPenulisan naskah akademik yang melibatkan lintas unit atau instansi
	Pekerjaan Mandiri (berbasis inisiatif JFAK)	<ul style="list-style-type: none">Pertimbangan bahan kajian dan analisis kebijakanAnalisis atau kajian atas isu-isu strategis

RKU berasal dari perjanjian kinerja antara pimpinan kementerian/lembaga dan JPT madya (pemerintah pusat), dan antara kepala daerah dan JPT madya (pemerintah provinsi) dan JPT pratama (pemerintah kabupaten). Perjanjian kinerja lalu diturunkan kepada JPT pratama atau Jabatan Administrasi, dan dibuat rencana kegiatan. JFAK menunjang pekerjaan JPT pratama dan pembagian pekerjaan dilakukan melalui diskusi secara langsung antara JPT pratama atau Jabatan Administrasi dengan JFAK. Dari diskusi tersebut juga akan ditentukan kegiatan yang membutuhkan anggaran.

5.3 PROSES KERJA JFAK



6

Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi, dan JFAK di dalam Organisasi

6.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

- Memahami peran JFAK dalam proses bisnis pembuatan kebijakan di organisasi pemerintah
- Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan dalam beragam skema penugasan (pelaksanaan RKU, pekerjaan *ad hoc* atau tugas tambahan untuk kebutuhan tertentu, dan pekerjaan mandiri berbasis inisiatif)
- Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan baik dikerjakan individual (sendiri) maupun berkelompok (bekerja sama dengan JF yang lain)
- Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan baik di pemerintah pusat dan daerah



Catatan: Proses bisnis pembuatan kebijakan yang ditampilkan pada bab ini mengikuti hasil pembahasan terbaru terkait pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JF dalam struktur birokrasi yang disederhanakan. Dengan demikian, proses bisnis pembuatan kebijakan dapat berubah sesuai dengan arah pembahasan pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JF di masa mendatang.

KOORDINATOR



Koordinator adalah pejabat fungsional yang diberi tugas untuk memimpin tim dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Koordinator mengkoordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Pejabat yang berwenang dapat menunjuk koordinator dengan rekomendasi ketua kelompok JF berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh JF tersebut tanpa memandang jenjangnya.

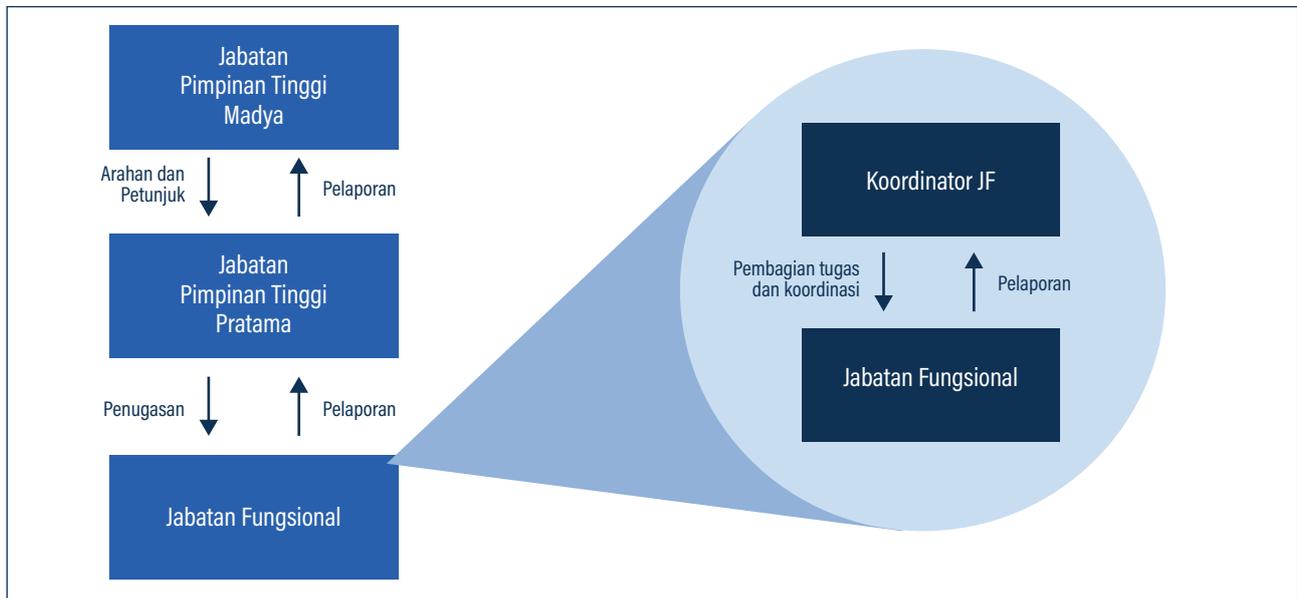
Pejabat yang berwenang menetapkan kegiatan, memberi arahan dan petunjuk kepada Koordinator, serta menentukan pembagian tugas Pejabat Fungsional pada masing-masing Kelompok Substansi Jabatan Fungsional pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pekerjaan yang tidak membutuhkan respons cepat (*immediate response*) perlu dilengkapi dengan surat penugasan dan kewajiban administrasi yang relevan. Adapun untuk pekerjaan yang membutuhkan respons cepat, surat penugasan dan kewajiban administrasi lainnya dapat disusulkan.

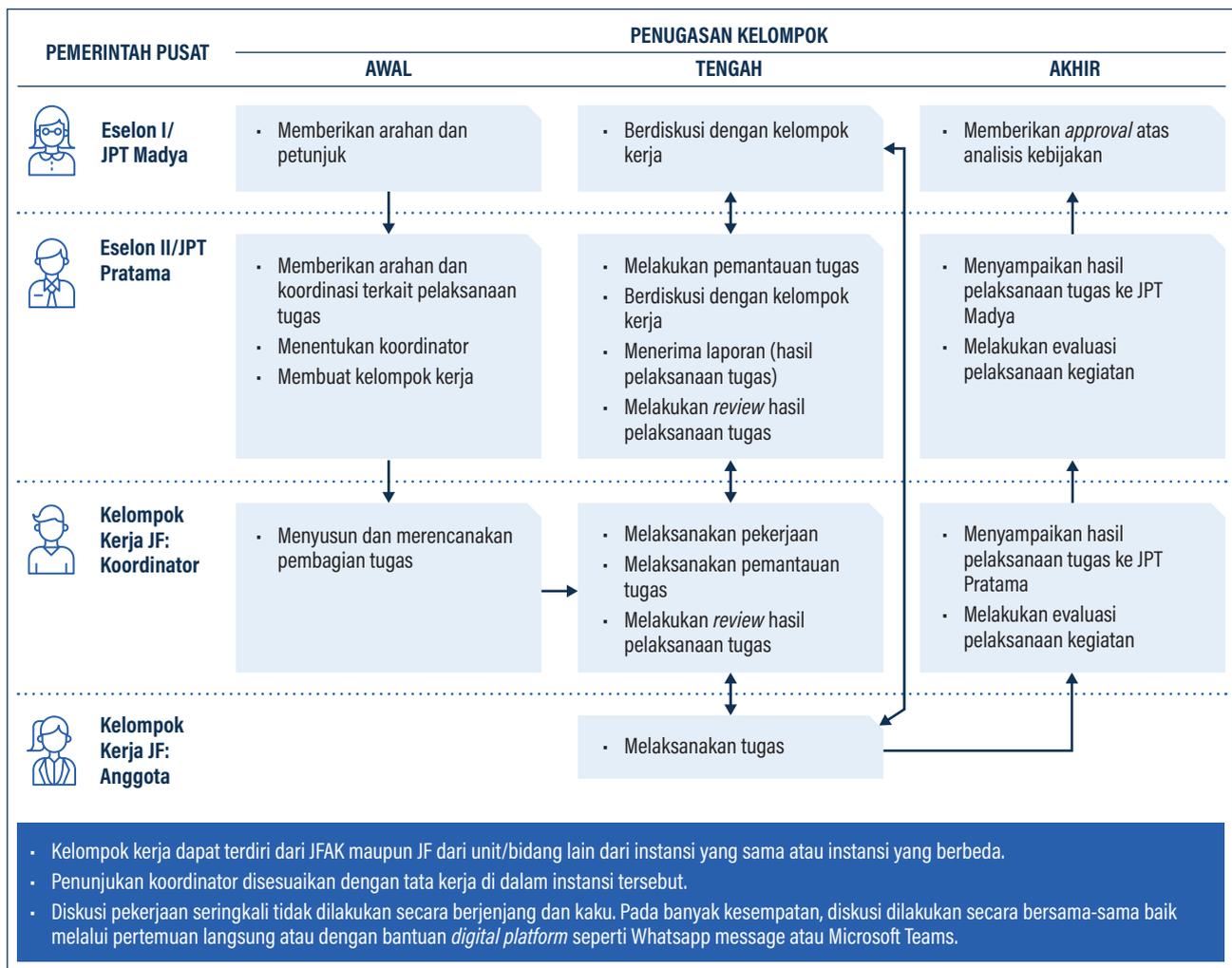


6.2. PETA PROSES BISNIS JPT, JABATAN ADMINISTRASI DAN JFAK DALAM PELAKSANAAN RKU DAN PENUGASAN AD HOC

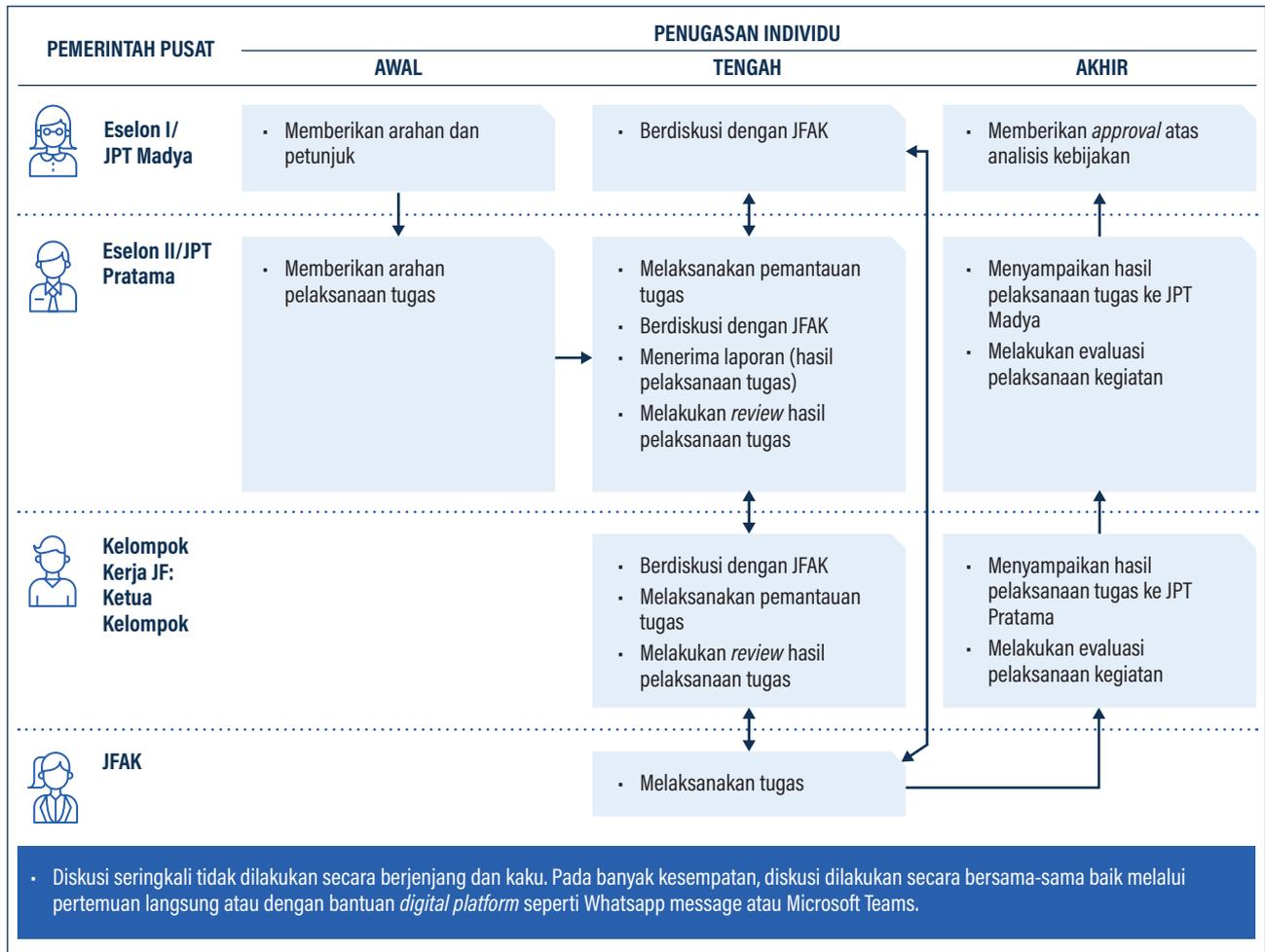
6.2.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat



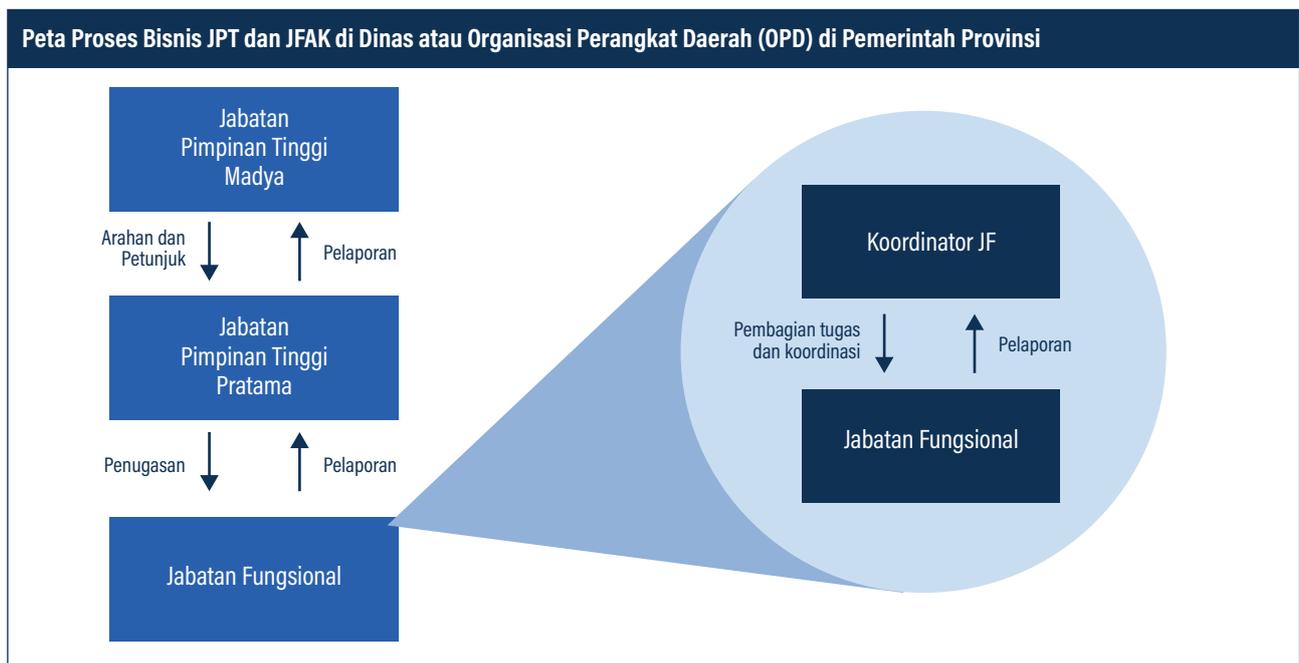
6.2.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat



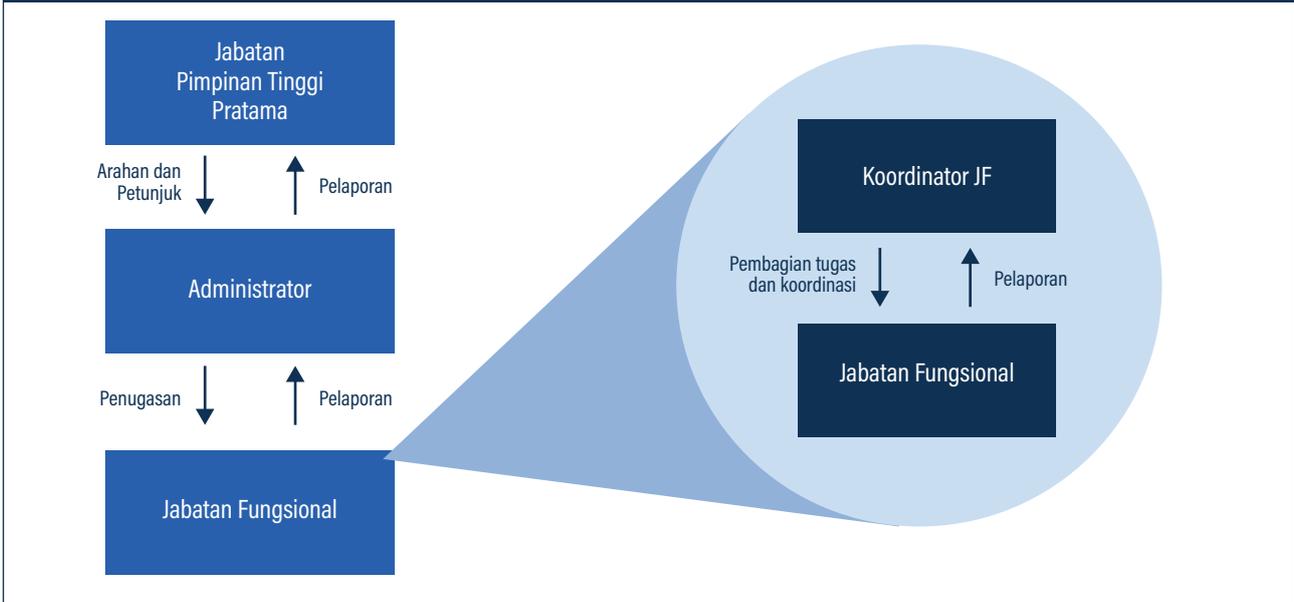
6.2.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat



6.2.2 Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah

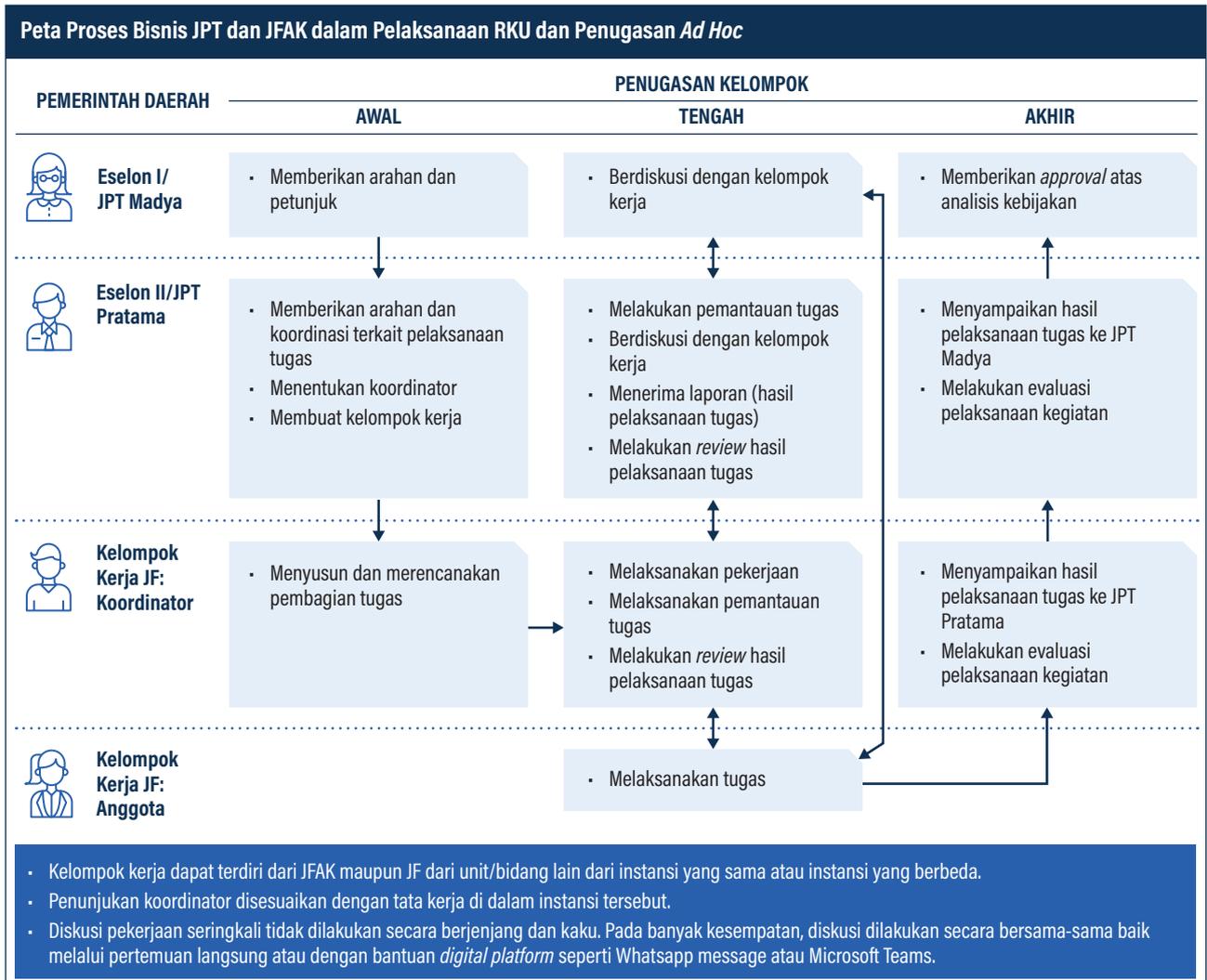


Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK di Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten/Kota

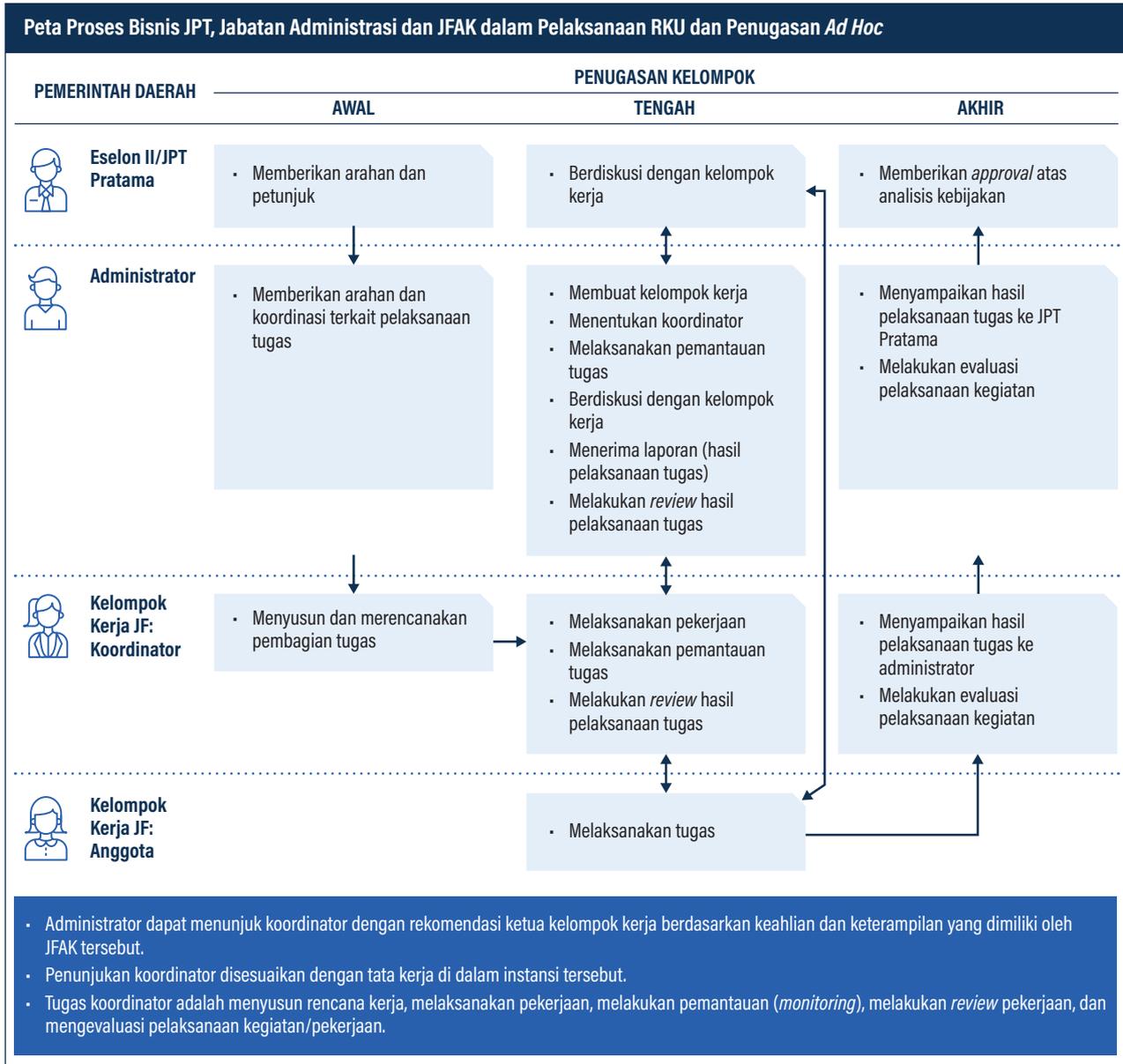


6.2.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah

PROVINSI

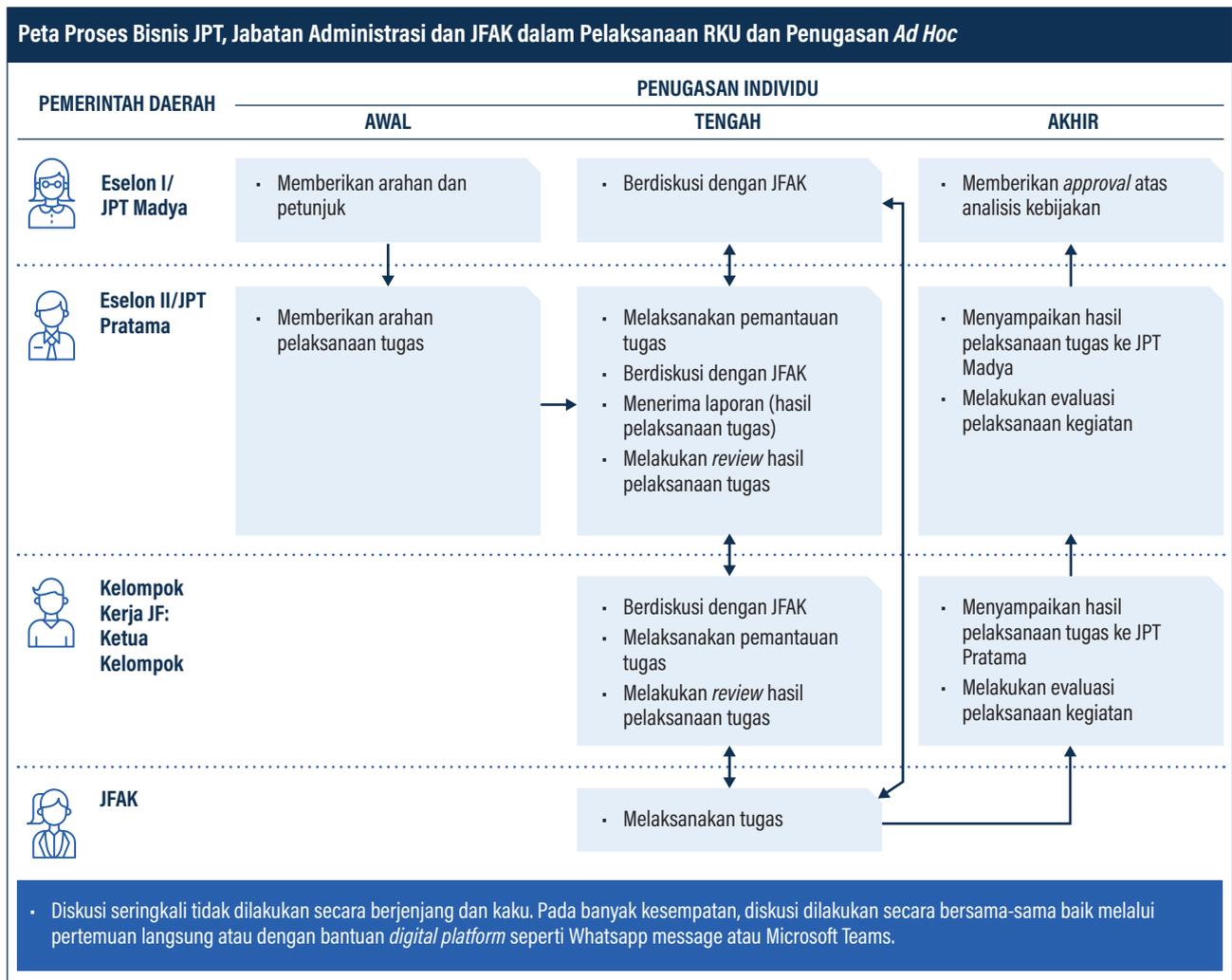


KABUPATEN/KOTA

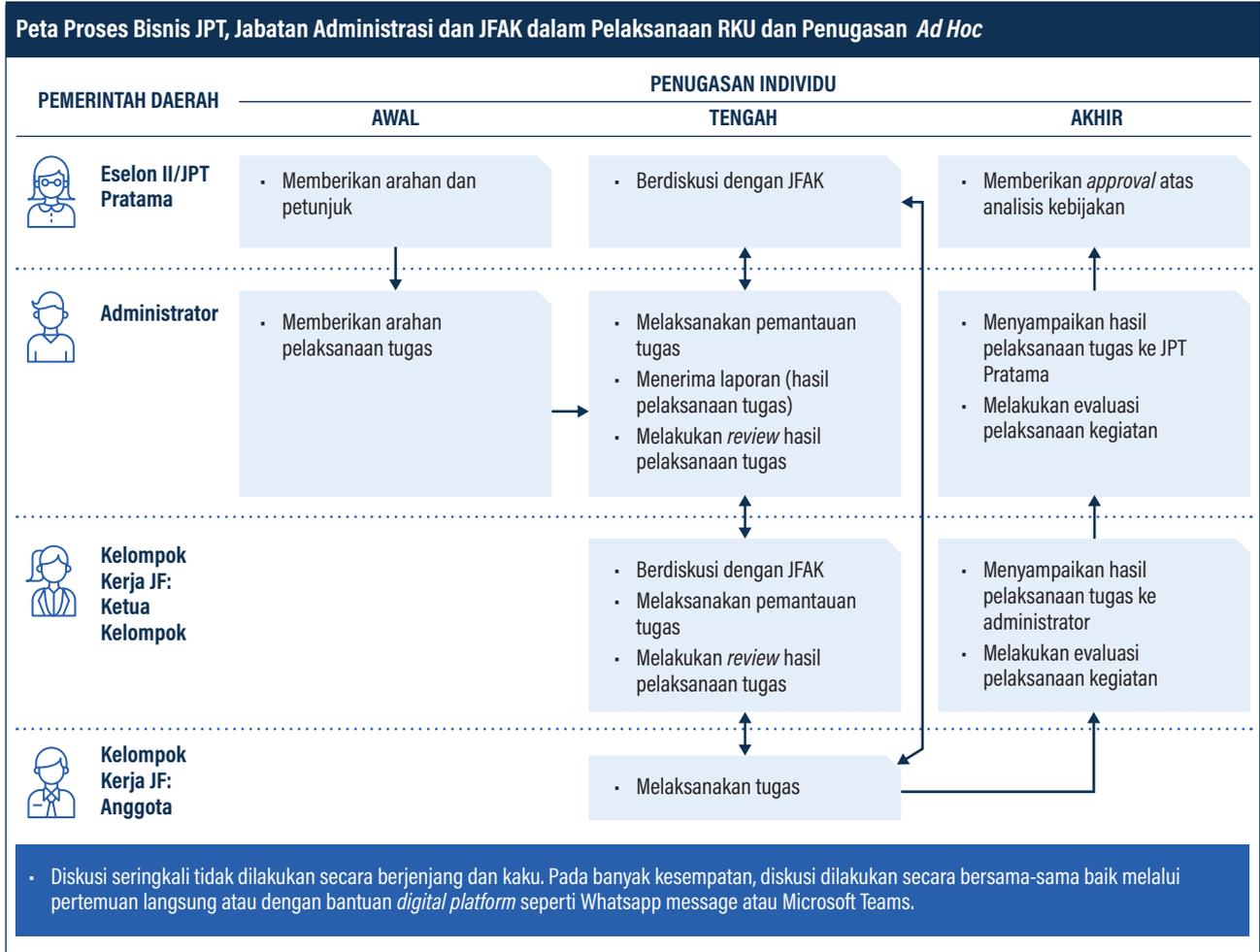


6.2.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah

PROVINSI



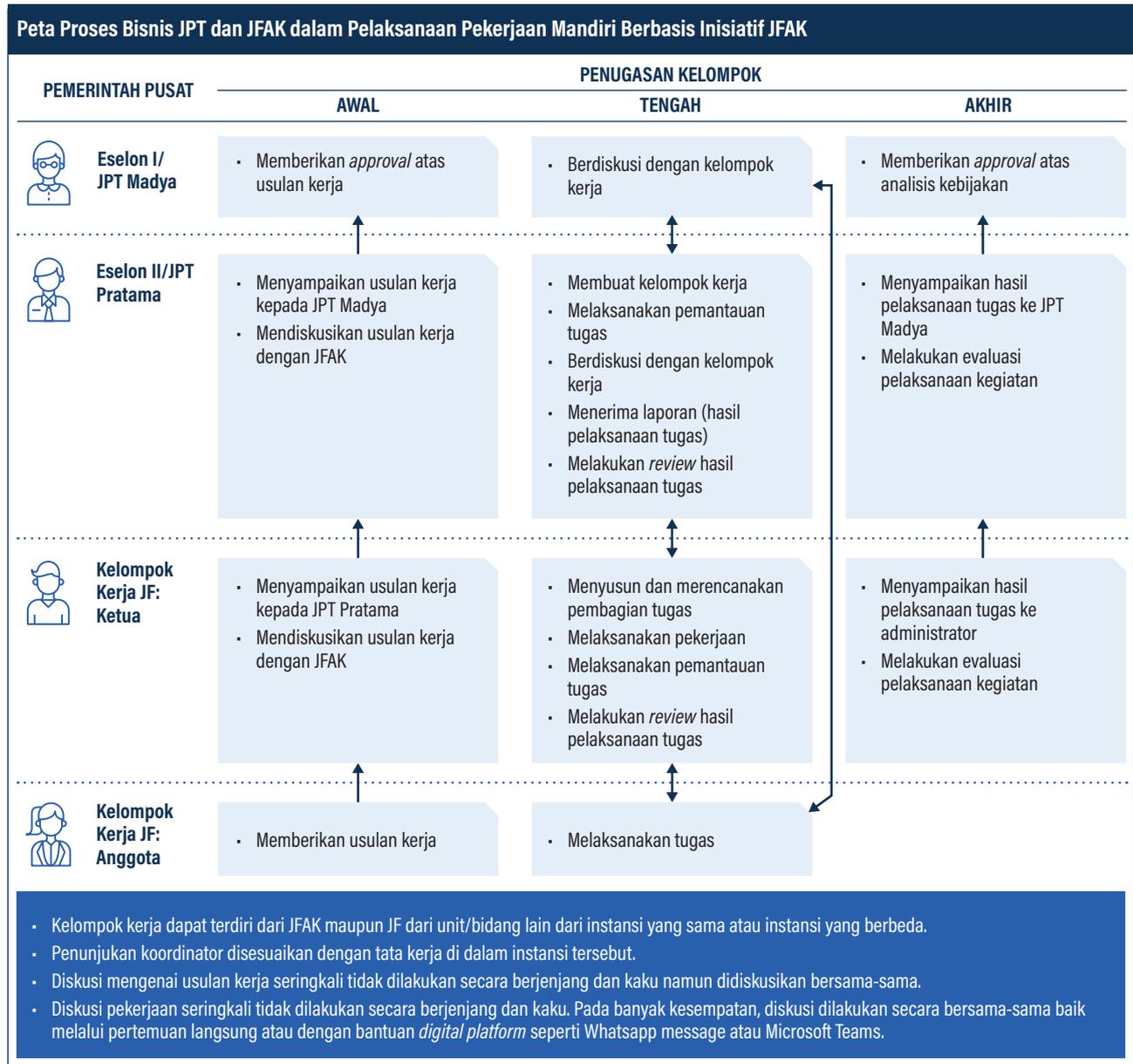
KABUPATEN/KOTA



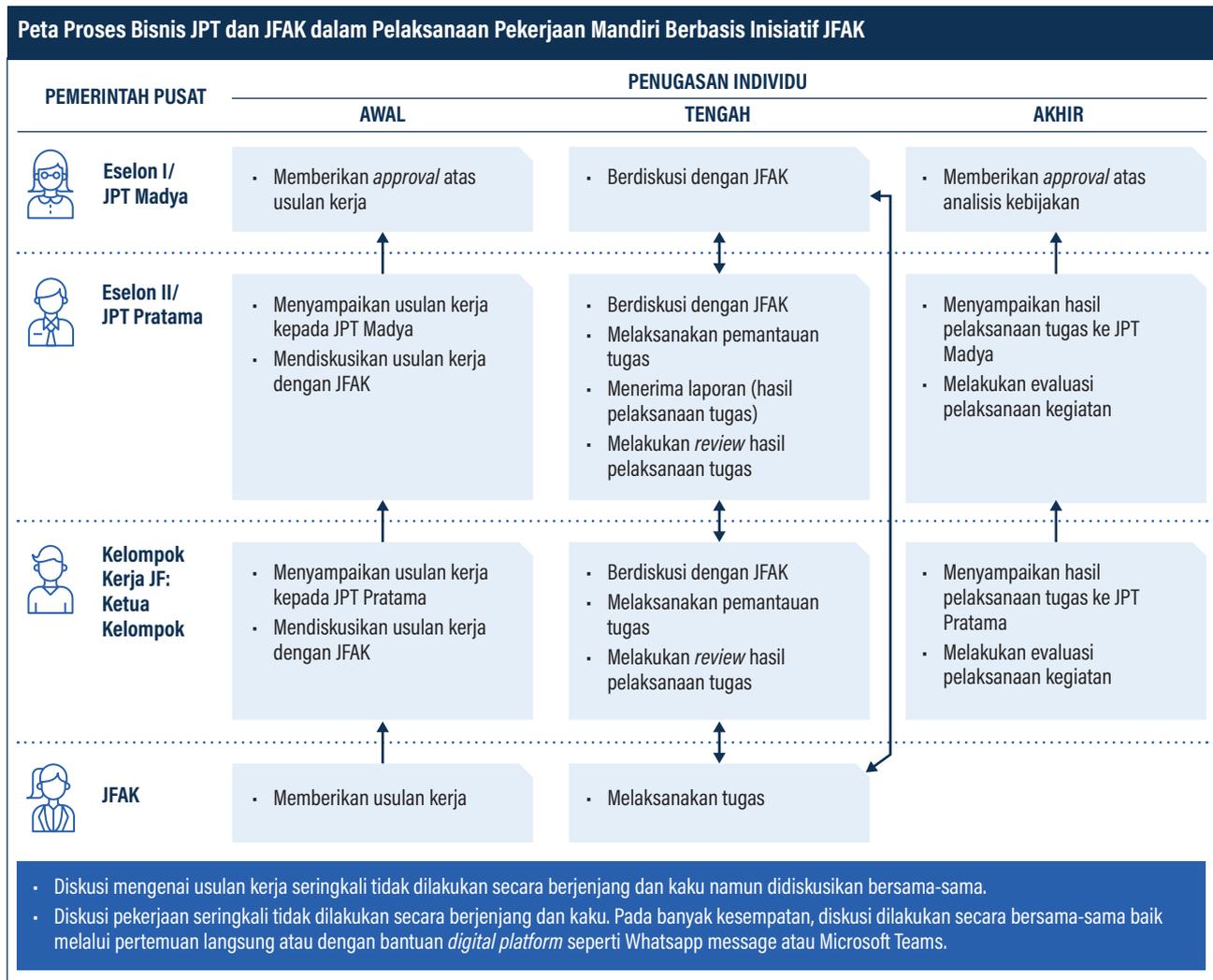
6.3. PETA PROSES JPT DAN JFAK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN MANDIRI BERBASIS INISATIF JFAK

6.3.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat

6.3.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat



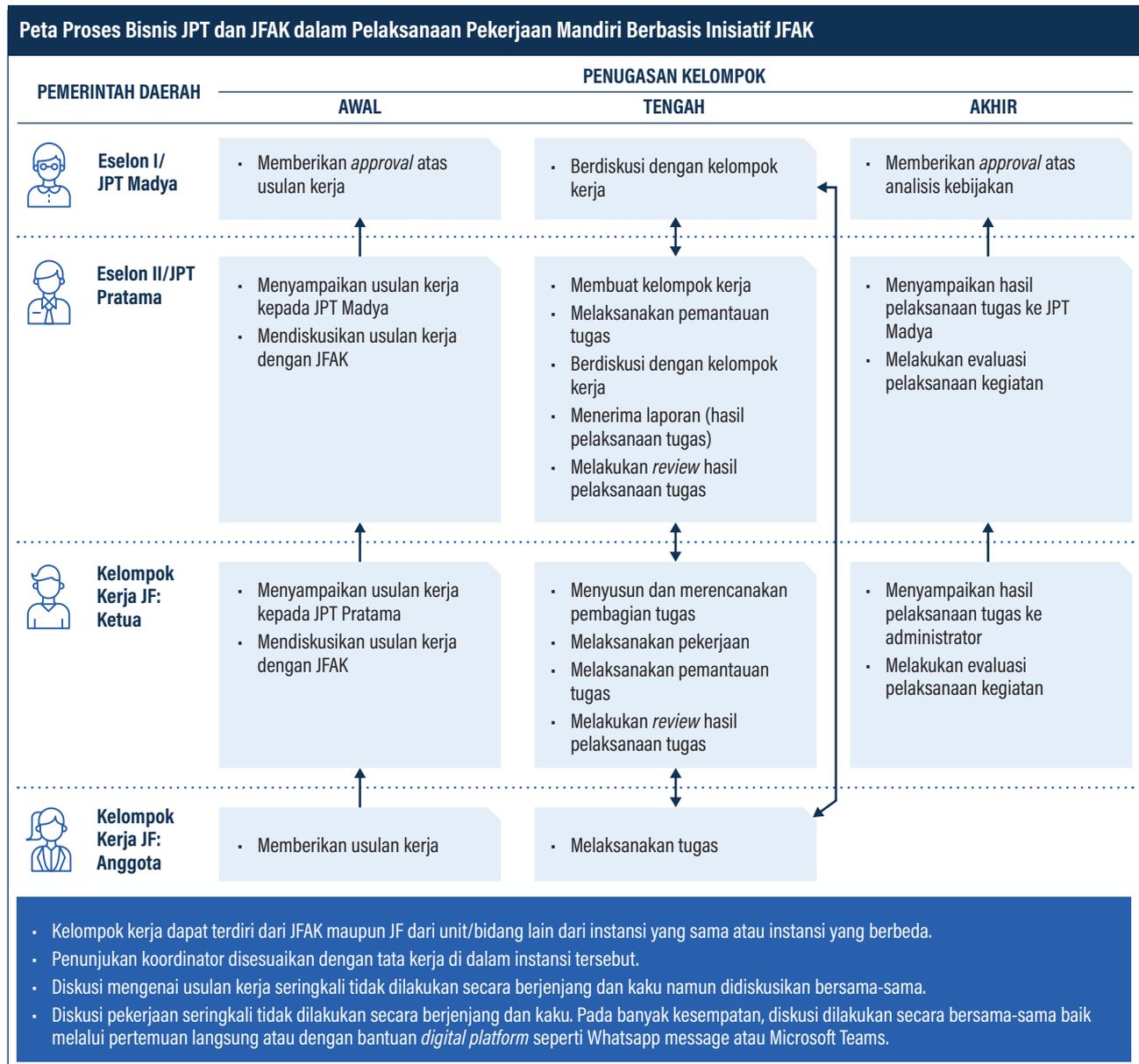
6.3.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat



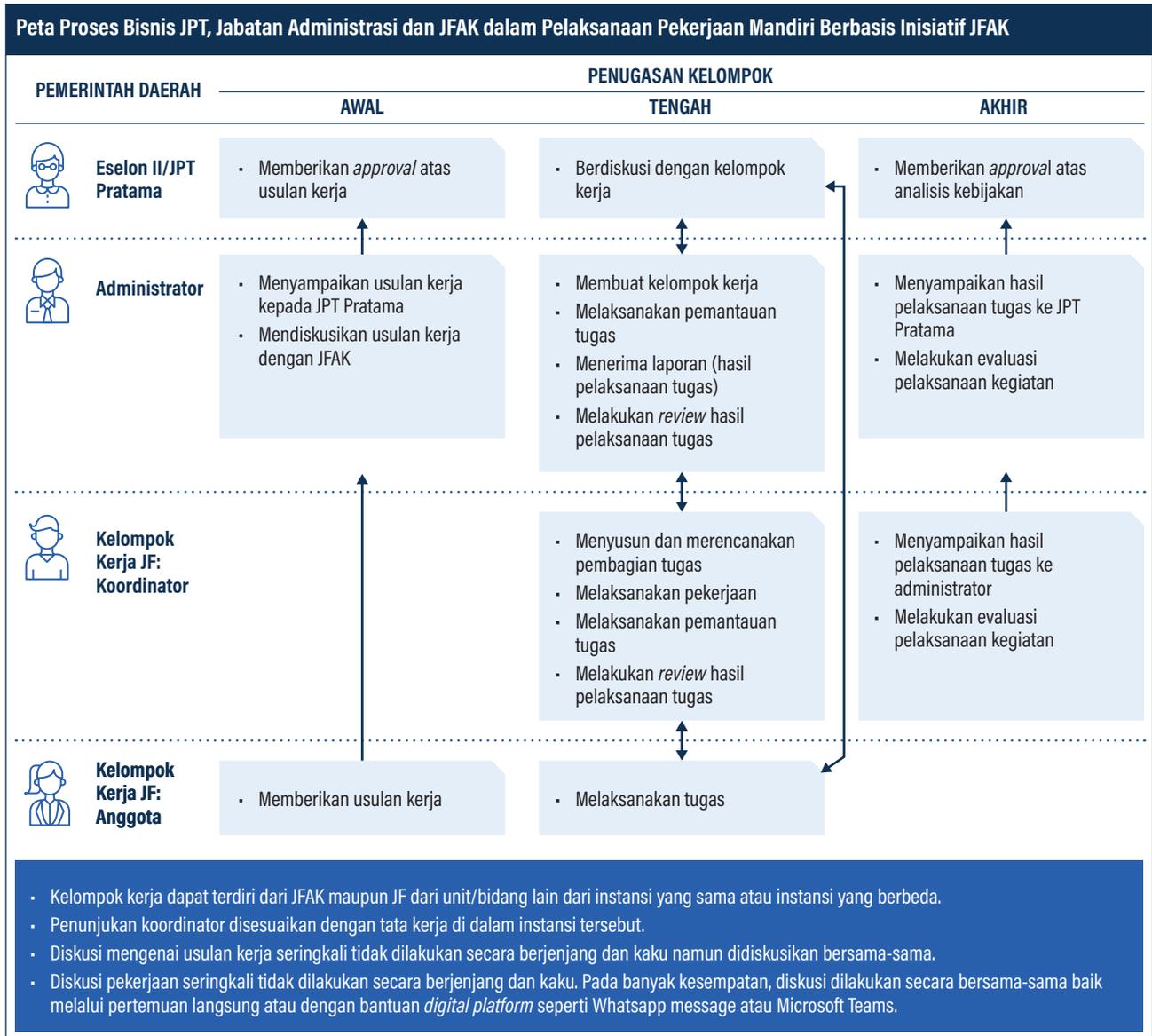
6.3.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah

6.3.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah

PROVINSI

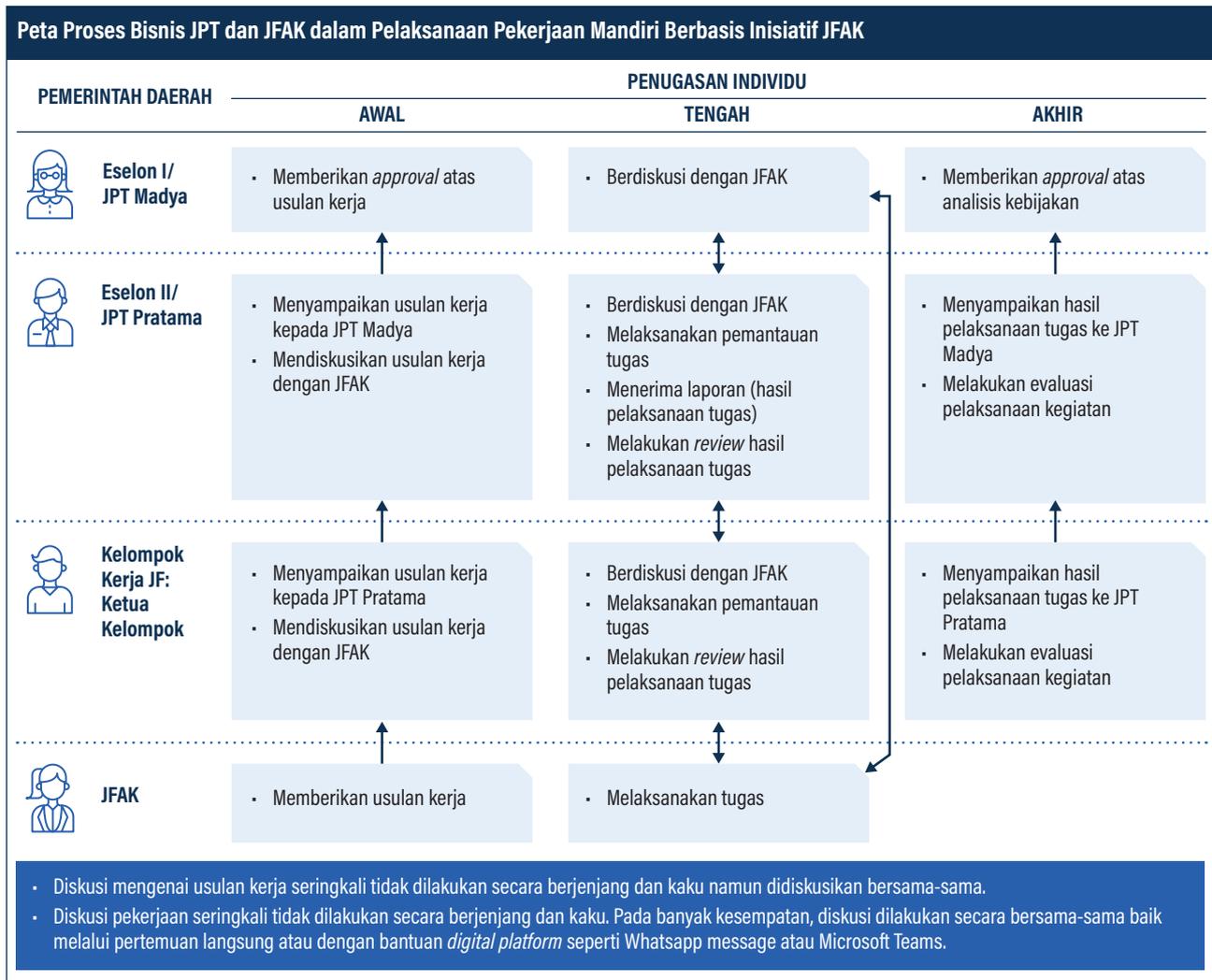


KABUPATEN/KOTA

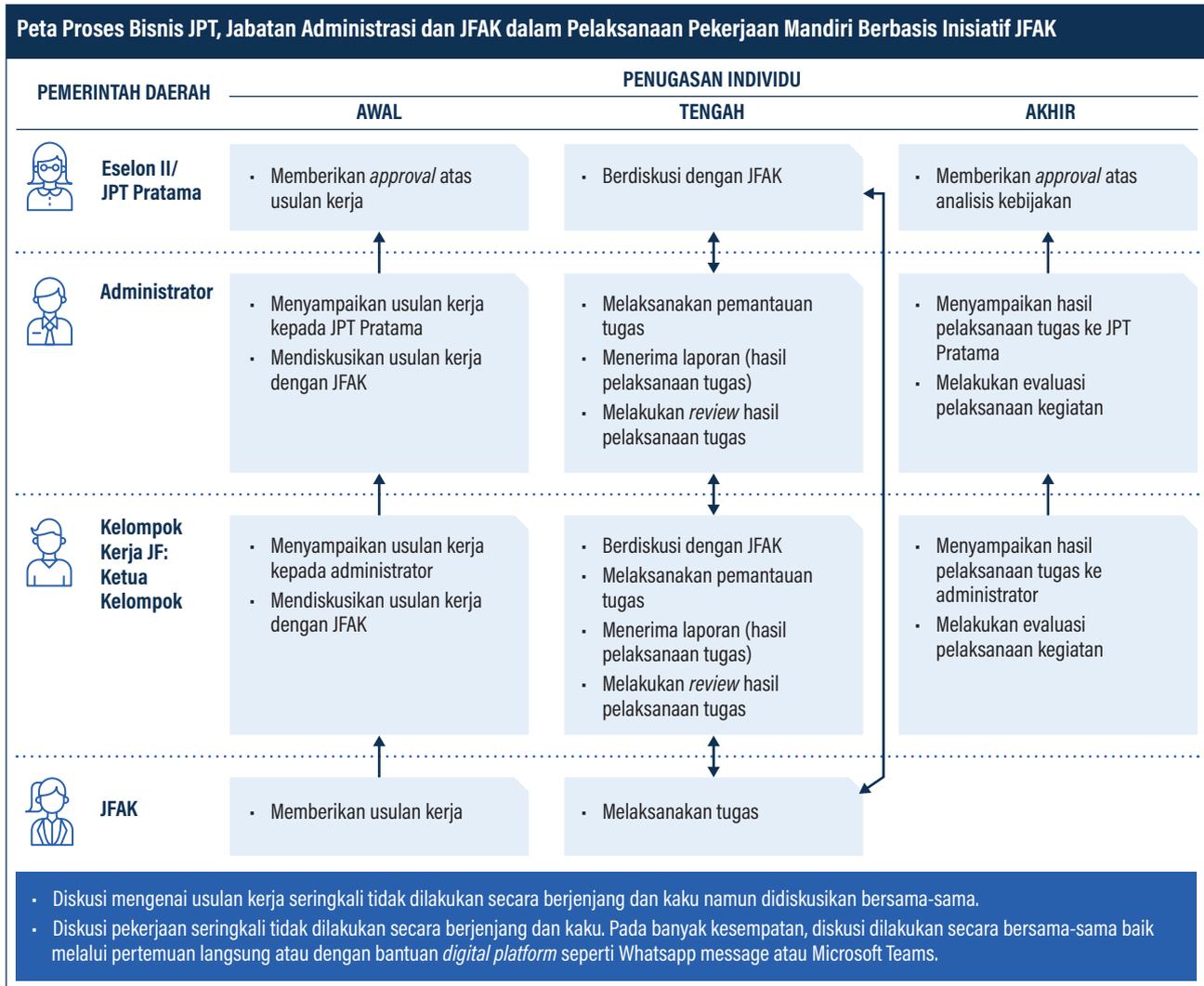


6.3.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah

PROVINSI



KABUPATEN/KOTA



Saran



- Penempatan JFAK dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kepakaran, kompetensi, dan minat dari JFAK, serta peta jabatan di dalam instansi.
- Instansi sebaiknya memiliki *dashboard* untuk mengawasi beban pekerjaan yang dimiliki oleh setiap JFAK, mengawasi pekerjaan yang dilakukan JFAK, dan memastikan tenggat penyelesaian analisis kebijakan.
- JPT pratama maupun administrator, koordinator atau ketua kelompok kerja bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan (*monitoring role*) JFAK termasuk me-*review* hasil analisis kebijakan. Namun, *review* atas analisis juga dapat dilakukan oleh sesama JFAK (*peer review*) atau dilakukan oleh *external stakeholders* (*external review*).
- Proses pemantauan, *review*, dan evaluasi dapat dilakukan melalui *digital platform* seperti Whatsapp Group atau Microsoft Teams. *Platform* ini memungkinkan proses pemantauan berlangsung secara *real time*, cepat, dan melibatkan banyak pihak sekaligus.

7

Satuan Hasil Kerja JFAK

7.1 PENDAHULUAN

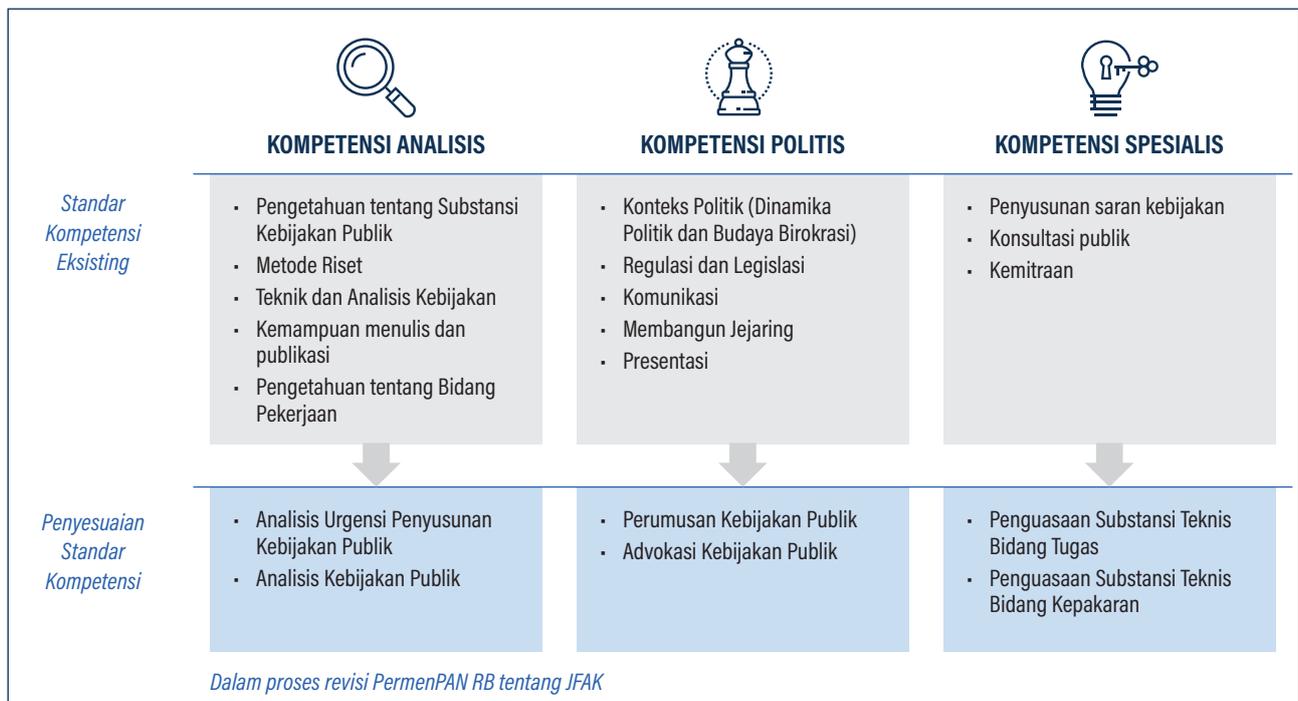
Tujuan bab ini:

- Mengetahui unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang Analis Kebijakan
- Mengetahui produk-produk hasil kerja Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan



Catatan: Unit kompetensi dan satuan hasil kerja JFAK yang ditampilkan pada bab ini mengikuti standar yang masih berlaku dan hasil pembahasan rancangan standar kompetensi terakhir dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dengan demikian, unit kompetensi dan satuan hasil kerja dapat berubah sesuai dengan penetapan standar yang baru di masa datang.

7.2 STANDAR KOMPETENSI JFAK



7.3 SATUAN HASIL KERJA JFAK

Semua jenjang JFAK dapat menghasilkan output yang sama, baik karya tulis kedinasan maupun karya tulis ilmiah. Beberapa satuan hasil JFAK akan disesuaikan dengan hasil penetapan PermenPAN-RB tentang JFAK yang baru.

KARYA TULIS KEDINASAN	 Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda	 Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional	 Monograf Kebijakan	 Laporan Hasil Pemantauan	
	 Laporan Hasil Evaluasi	 Telaahan Staf	 Bahan Pidato/ Ceramah/ Presentasi	 Memo Kebijakan	 Modul Diklat
	 Model Kebijakan	 Alat Bantu	 Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat	 Buku Pedoman	 Juklak/ Juknis
	 Surat penugasan	 Laporan diseminasi kebijakan	 Laporan advokasi kebijakan	 Daftar konsultasi dan hasil konsultasi	 Rancangan Kebijakan
KARYA TULIS ILMIAH	 Policy Paper	 Policy Brief	 Artikel Kebijakan	 Makalah	



Setiap satuan hasil JFAK harus memiliki muatan terkait substansi kajian dan analisis kebijakan publik. Definisi setiap satuan hasil dalam kategori Karya Tulis Kedinasan dapat mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas di instansi masing-masing. Sedangkan Karya Tulis Ilmiah JFAK mengacu pada Pedoman dari LAN.

Definisi dari masing-masing satuan hasil JFAK dapat dilihat di bagian Appendix.

8

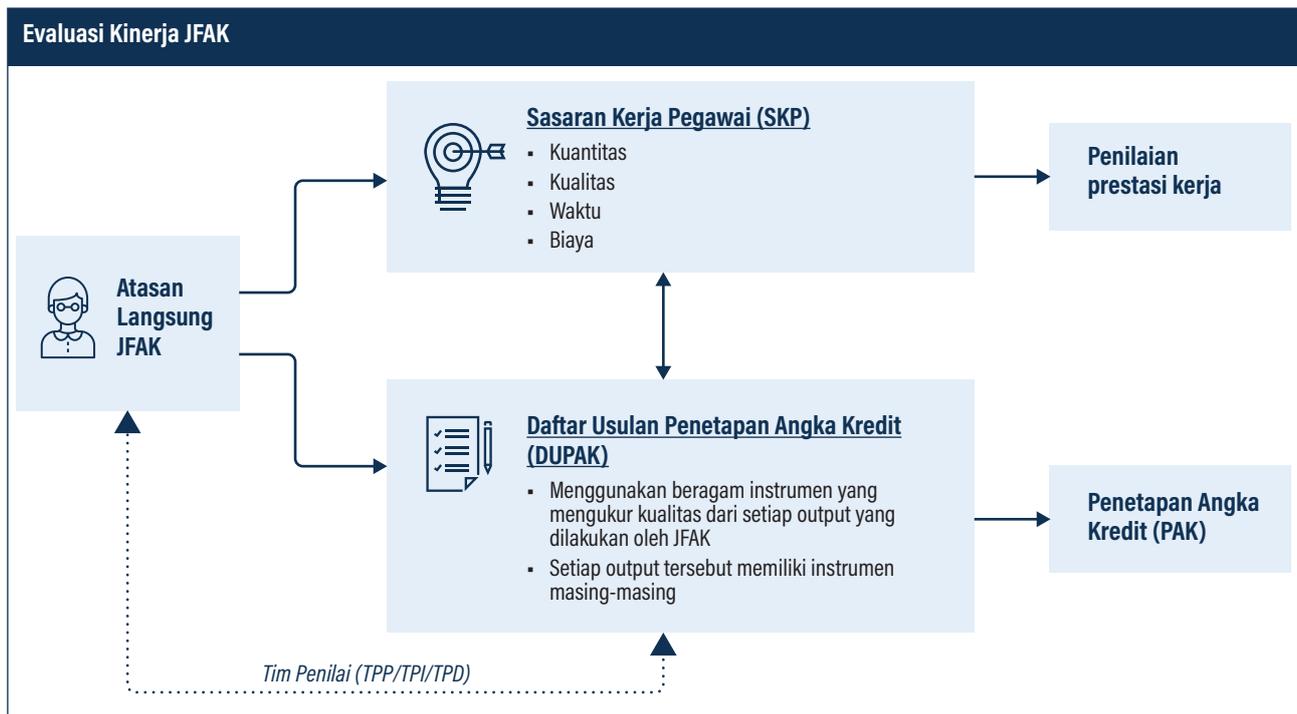
Evaluasi Kinerja JFAK

8.1 PENDAHULUAN

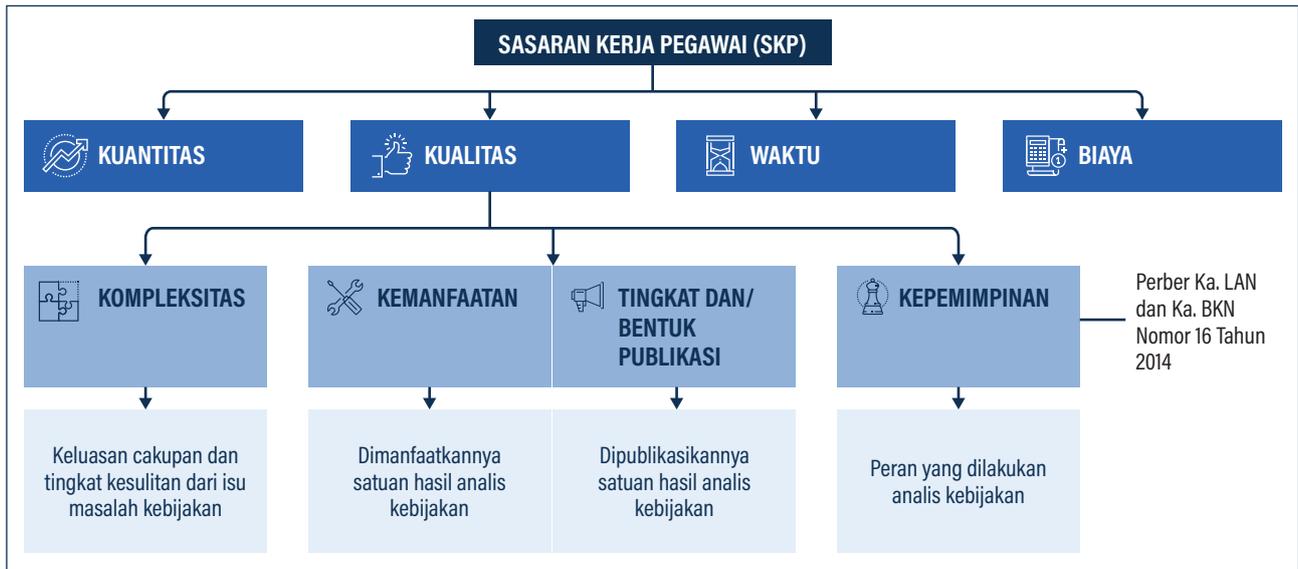
Tujuan bab ini:

- Mengetahui proses evaluasi kinerja JFAK
- Mengetahui beragam indikator yang digunakan dalam menilai kualitas kerja JFAK
- Mengetahui instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan (*policy tracking*)

8.2 PROSES EVALUASI KINERJA JFAK

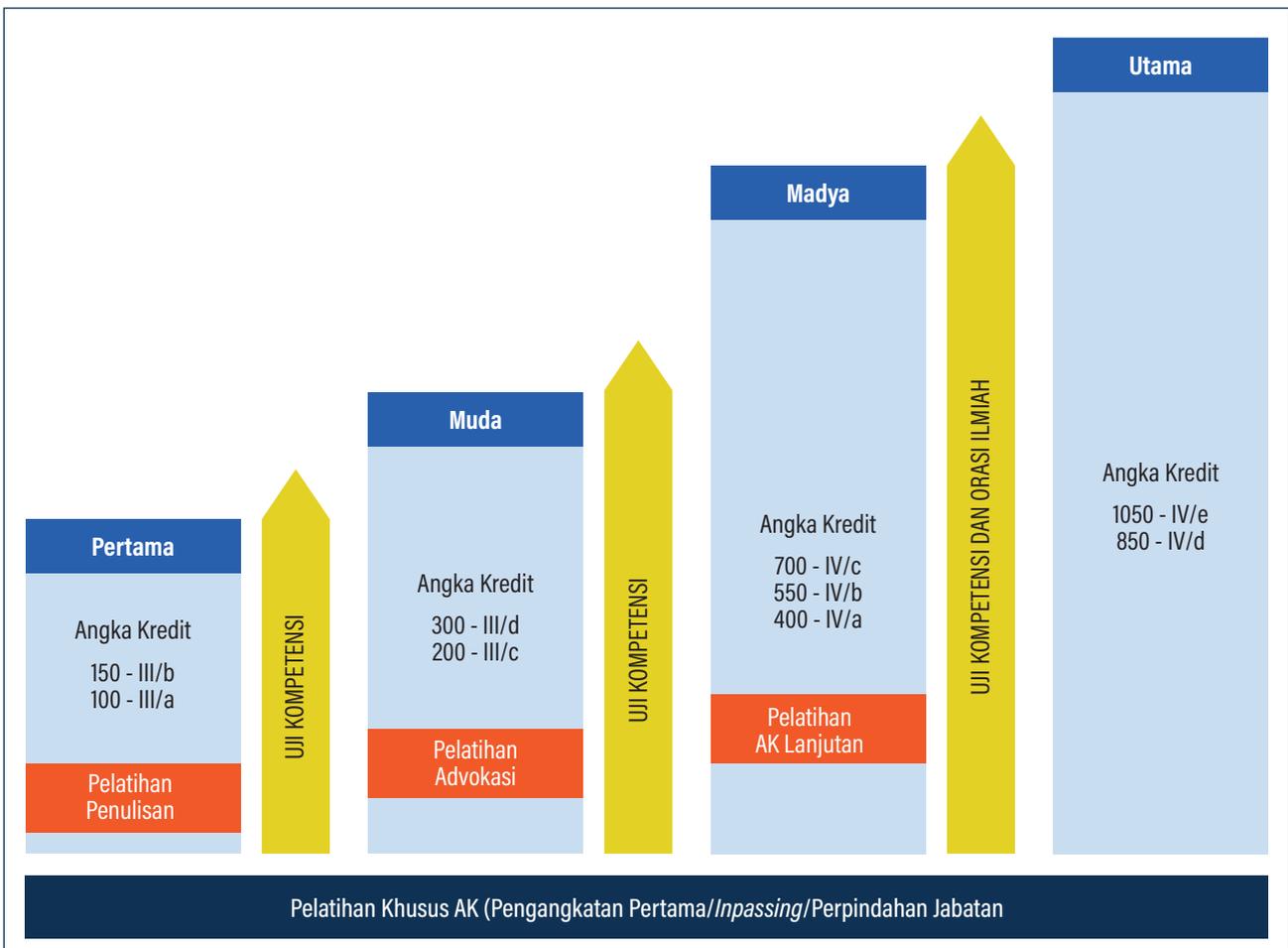


8.3 INDIKATOR PENILAIAN KUALITAS KERJA JFAK

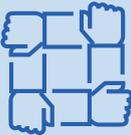
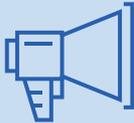


8.4 POLA KARIER JFAK

Kenaikan jenjang jabatan JFAK perlu memenuhi persyaratan, meliputi angka kredit, uji kompetensi, pelatihan teknis dan beberapa persyaratan yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.



8.5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN (*POLICY TRACKING*)

DAMPAK	INDIKATOR POTENSIAL
 <p>Perubahan sosial dalam hal kesadaran, kepercayaan, sikap dan perilaku, nilai serta prioritas terhadap isu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuantitas dan variasi dari profil pengambil kebijakan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ▪ Kepuasan publik terhadap pelayanan ▪ Kuantitas dan kualitas inovasi yang dilakukan
 <p>Peningkatan kemampuan dalam merumuskan solusi alternatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan tipe <i>output</i> yang dihasilkan dari proses pembuatan kebijakan
 <p>Peningkatan jumlah institusi yang terlibat dalam penyelesaian isu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuantitas dan variasi dari profil institusi yang terlibat ▪ Kualitas diskusi, fokus, dan <i>output</i> kerja sama
 <p>Peningkatan kesadaran untuk berkolaborasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan pengambil kebijakan untuk bekerja sama
 <p>Peningkatan atensi dan pengetahuan publik terhadap isu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan variasi dari profil kerja sama lintas sektor ▪ Kuantitas, kualitas, dan relevansi dari kebijakan ▪ Jumlah pertemuan/interaksi antara pengambil kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait
 <p>Peningkatan jumlah cakupan konsultasi kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permintaan publik terhadap informasi ▪ Jumlah dan variasi dari profil pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi konsultasi kebijakan
 <p>Peningkatan jumlah cakupan kampanye kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat keterlibatan publik dalam diskusi dan pengambilan kebijakan ▪ Jumlah <i>quotes</i> dari para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
 <p>Peningkatan dalam hal liputan media</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuantitas dan kualitas dari ulasan media massa baik itu cetak, maupun elektronik

9

Pengembangan Kompetensi JFAK

9.1 PENDAHULUAN

Tujuan bab ini:

- Mengetahui jenis-jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang perlu diberikan kepada Analis Kebijakan
- Memahami kebutuhan pengembangan kompetensi yang dapat dikembangkan instansi.



Pengembangan kompetensi JFAK menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pembina dengan instansi di mana para analis kebijakan bekerja. Instansi pembina memiliki peran utama dalam upaya mengembangkan kompetensi melalui pelatihan fungsional, sedangkan untuk pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan non-fungsional dapat dilakukan secara mandiri oleh instansi ataupun oleh JFAK sendiri. Instansi dapat melakukan berbagai jenis pengembangan kompetensi baik dengan metode klasikal maupun non klasikal sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan instansi memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan pembelajar secara terintegrasi (*embedded*) dengan kebutuhan pengembangan kompetensi JFAK di unit kerjanya.



Saran bagi Kepegawaian/SDM

- Referensi melakukan analisis kesenjangan kompetensi
- Mempersiapkan kebutuhan peta jabatan dan formasi JFAK yang relevan di instansi
- Menyusun rencana (*training need assessment*) dan melaksanakan pengembangan kompetensi serta karier JFAK yang relevan untuk meningkatkan kualitas kebijakan sesuai bidang tugas instansi



Saran bagi JPT atau atasan langsung JFAK

- Pembinaan internal JFAK sesuai dengan kedudukan JFAK di instansi
- Mengelola mekanisme penugasan dari pimpinan agar dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Mengembangkan kompetensi JFAK sesuai dengan kebutuhan organisasi



Saran bagi JFAK

- Membekali pemahaman AK untuk advokasi mengenai peran penting JFAK dalam peningkatan kualitas kebijakan
- Melakukan *self development planning* terkait pengembangan karier ataupun pengembangan kompetensi bagi pemangku JFAK

9.2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI JFAK

Berikut adalah contoh-contoh pelatihan yang perlu diikuti oleh para Analis Kebijakan di masing-masing jenjang. Pelatihan-pelatihan ini dapat dilakukan baik secara klasikal maupun non klasikal.

Pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan dari proses pengangkatan pertama melalui formasi CPNS saat ini dapat diikuti setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dan dilantik ke dalam JFAK (sesuai dengan ketentuan baru yang berlaku).

Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama



MANAJERIAL

- Pelatihan dasar bagi CPNS



TEKNIS

- Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analis Kebijakan (*policy brief/policy paper/jurnal*)
- Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik
- Pelatihan *data science (big data)*
- Pelatihan infografis



FUNGSIONAL

- Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui *inpassing* dan pengangkatan pertama)

Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Muda



MANAJERIAL

- Pelatihan budaya integritas dan anti korupsi
- Pelatihan *coaching/mentoring*
- Pelatihan kepemimpinan administrator atau pengawas



TEKNIS

- Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analis Kebijakan (*policy brief/policy paper/jurnal*)
- Pelatihan menulis naskah karya tulis kedinasan
- Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik
- Pelatihan *data science (big data)*
- Pelatihan infografis



FUNGSIONAL

- Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui *inpassing* dan pengangkatan pertama)

Jenis Pelatihan bagi **Analisis Kebijakan Ahli Madya**



- Pelatihan Kepemimpinan Nasional



- Pelatihan Advokasi Kebijakan
- Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus
- Pelatihan menulis studi kasus kebijakan
- Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional
- Pelatihan menulis orasi ilmiah Analisis Kebijakan



- Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui *inpassing* dan pengangkatan pertama)

Jenis Pelatihan bagi **Analisis Kebijakan Ahli Utama**



- Pelatihan Kepemimpinan Nasional



- Pelatihan Advokasi Kebijakan
- Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus
- Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional
- Pelatihan menulis orasi ilmiah Analisis Kebijakan



- Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui perpindahan dari jabatan lain)
- Pelatihan Analisis Kebijakan Lanjutan (bagi AK Ahli Utama yang naik jenjang dari AK Ahli Madya)

9.3 PRAKTIK BAIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI JFAK

Pengembangan Kompetensi JFAK BKF



BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) KEMENTERIAN KEUANGAN

BKF Kementerian Keuangan melaksanakan transformasi organisasi dan memperkuat *enabling environment* organisasi yang baik dalam optimalisasi peran JFAK sehingga bisa membangun hubungan simetris antara AK dan pimpinannya. BKF memastikan bahwa JFAK memiliki keterlibatan dalam kegiatan utama kajian dan analisis kebijakan di unit kerjanya. BKF memperkuat model pengembangan kompetensi non klasikal melalui model *peer learning* JF antar-jenjang. JFAK yang ditunjuk menjadi mentor dipilih dari pegawai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Model ini mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun kepercayaan diri para analis kebijakan dalam menganalisis kebijakan dan mengadvokasikan hasilnya kepada pimpinan sehingga bisa digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan keputusan.

Kompetensi Strategis BKF

KOMPETENSI STRATEGIS BKF



	Persiapan	Pelaksanaan Analisis	Perumusan Rekomendasi	Legislasi	Publikasi
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Penugasan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan informasi Analisis Komunikasi, konsultasi, koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian rekomendasi ke pimpinan Pemaparan ke pimpinan Timbal balik pimpinan Uji publik 	<ol style="list-style-type: none"> Legal drafting Advokasi kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Diseminasi Artikel
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> Telaah kebijakan Memo kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemantauan Daftar konsultasi & hasil konsultasi Laporan hasil evaluasi Telaah kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Bahan pidato Bahan presentasi Naskah akademik Policy paper Policy brief Telaahan kebijakann 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan advokasi kebijakan Laporan hasil pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporann diseminasi kebijakan Artikel kebijakan Makalah kebijakan Buku referensi kebijakan Monograf kebijakan

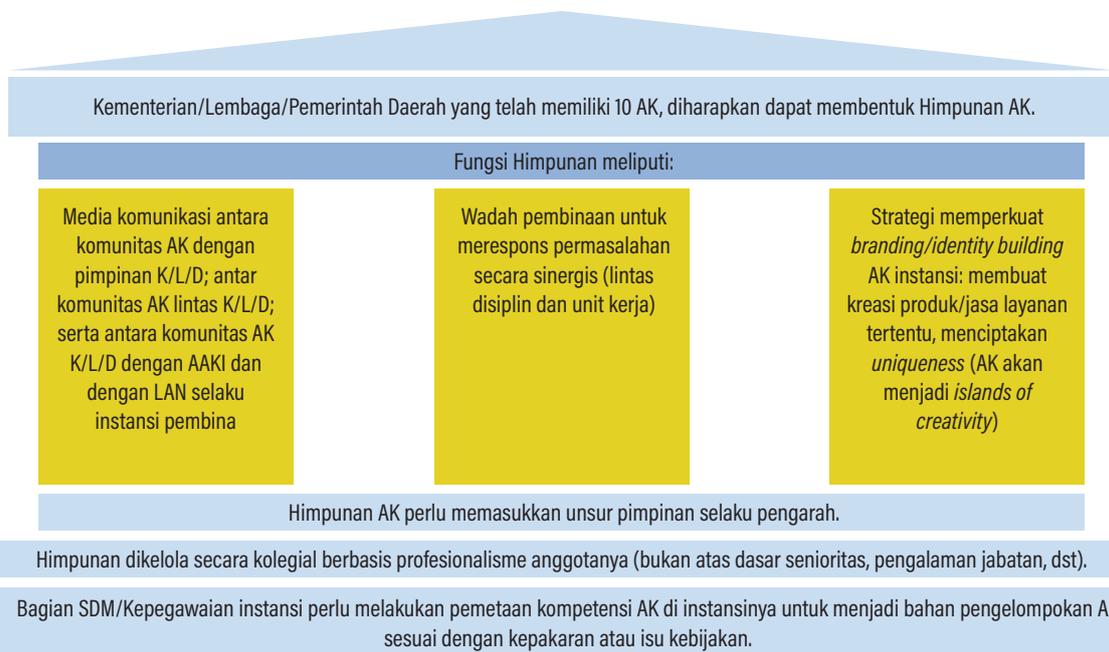
Pengembangan Kompetensi JFAK Kementerian Kesehatan (Kemenkes)



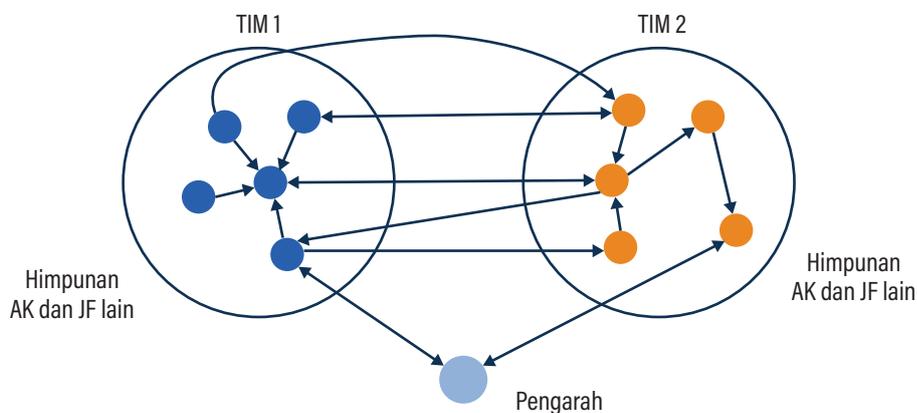
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kemenkes mendorong terbentuknya himpunan analis kebijakan di instansi. Dengan spesialisasi JFAK sesuai bidang kepakaran masing-masing diharapkan pimpinan lebih mudah memberikan penugasan dalam melakukan analisis kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tugas fungsi instansi yang harus segera direspon kepada pemangku kepentingan. Untuk memperdalam kompetensi JFAK, Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Kemenkes bekerja sama dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) untuk secara reguler memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan serial *workshop* dan simposium bagi para JFAK di lingkungannya dengan mengundang beberapa ahli di bidang kebijakan publik.

Konsep Himpunan Analis Kebijakan Instansional sebagai Model Utilisasi



Sumber: Diolah dari Tri Widodo W. Utomo, Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN dalam Paparan "Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK" pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan, 26 Oktober 2019.



Sumber: BKF dalam FGD Pendayagunaan JFAK Seri Ke-2, 2020



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KemenPAN-RB mengembangkan sistem manajemen talenta instansi dan mengelola distribusi penempatan JFAK di unit-unit kerja lini di beberapa kedeputian. Ada JFAK yang ditempatkan di unit sekretariat namun berada di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) yang masih memiliki relevansi pekerjaan dengan bidang kajian dan analisis kebijakan. Melalui manajemen talenta yang dikembangkan, Biro SDM KemenPAN-RB memastikan agar pelaksanaan rotasi pegawai antar-unit pada saat diperlukan menjadi lebih mudah. Rotasi pegawai antar unit dalam satu area substansi pekerjaan, termasuk para analis kebijakan di dalamnya, dipandang sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai. Rotasi pegawai dilakukan secara berkala untuk penyegaran sumberdaya organisasi dan menghindari kejenuhan pegawai di unit kerja. Dengan semakin banyaknya pemangku JF analis kebijakan di KemenPAN RB, Biro SDM juga memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Diklat melalui *in house training* secara rutin bagi untuk Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan. Saat ini Biro SDM KemenPAN-RB sedang mengembangkan modul pengembangan kompetensi non klasikal (*non-classical training*) seperti modul *e-learning* dan modul program magang bagi seluruh pegawai (termasuk juga bagi Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan).

Selain itu, pimpinan di unit lini atau di kedeputian memberikan otonomi pelaksanaan tugas kepada para analis kebijakan agar mereka bisa mengawal isu-isu kebijakan substansial yang berkaitan dengan kewenangan KemenPAN-RB. Contohnya, Kepala Pusat di Kedeputian Kelembagaan secara aktif memberi penugasan kepada analis kebijakan dalam melakukan *review* dan konsultasi publik terkait usulan-usulan desain kelembagaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disampaikan ke KemenPAN-RB. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para analis kebijakan di lingkungan Kedeputian Kelembagaan dalam melakukan analisis kebijakan secara komprehensif serta mengadvokasi kebijakan terkait isu-isu kelembagaan.

10

Penutup

Pedoman ini dibuat sebagai pegangan bagi atasan langsung JFAK, pejabat pembina kepegawaian, dan JFAK terkait dengan peran dan fungsi JFAK di dalam siklus kebijakan, proses kerja JPT dan JFAK, standar kompetensi JFAK, evaluasi kinerja JFAK, dan kebutuhan pengembangan kompetensi JFAK.

Harapannya, ketika pemahaman akan JFAK meningkat maka meningkat pula upaya untuk mengoptimalkan peran JFAK di organisasi pemerintah sehingga dapat terwujud pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Substansi di dalam pedoman ini disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, substansi dapat berubah menyesuaikan dengan dinamika peraturan dan kebijakan di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut silakan melakukan konsultasi langsung dengan instansi pembina JFAK.

Sedulur Pusaka

(Sistem Pengaduan dan Jalur Komunikasi)
Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan



lan.go.id
pusaka.lan.go.id



Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110



analiskebijakan@gmail.com



Komunitas Analisis Kebijakan



(021)3868201-05, 3455021-5



pusakalan



Whatsapp 081235100050



@AnalisisKebijakan



Fax: (021) 3800187



Jendela Analisis Kebijakan

Appendix

KARYA TULIS KEDINASAN

Naskah Akademik: Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional: buku yang digunakan sebagai bahan informasi/rujukan yang mutakhir dan digunakan sebagai acuan dalam lingkup kebijakan.

Monograf Kebijakan: dokumen tertulis yang spesifik berisi satu atau sejumlah topik/subyek yang berkaitan dan merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan.

Laporan Hasil Pemantauan: dokumen tertulis yang berisi laporan atau pencatatan hasil observasi rutin dan analisis aktivitas sebuah kebijakan sebagai bahan masukan/*feedback* dalam pelaksanaan kebijakan.

Laporan Hasil Evaluasi: dokumen tertulis yang berisi laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan baik berupa evaluasi untuk meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis pencapaian tujuan kebijakan.

Telaahan Staf: uraian yang disampaikan Analisis Kebijakan yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan dalam waktu singkat.

Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: materi tertulis tentang kebijakan yang disiapkan oleh Analisis Kebijakan untuk pidato/ceramah/presentasi/konferensi pers.

Memo Kebijakan: uraian analisis singkat dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang dapat direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan dan dapat menjadi landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas.

Modul Diklat: dokumen yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi Analisis Kebijakan di bidang kebijakan publik.

Model Kebijakan: dokumen tertulis yang menguraikan konsep dari sebuah rekomendasi kebijakan yang didukung dengan referensi literatur atau informasi ilmiah dan data dukung (bukti) yang relevan.

Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau analisis, hasil telaah atau pengembangan hasil penelitian yang dapat berbentuk perangkat lunak (*soft file*) atau perangkat keras (*hard file*) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan penyusunan kebijakan atau kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik.

Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: produk/karya dalam bentuk visual/infografis atau *audio visual* yang dapat berbentuk perangkat lunak (*soft file*) atau perangkat keras (*hard file*) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik.

Buku Pedoman: dokumen yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan institusi, baik bersifat pengaturan, penetapan, atau pendelegasian tugas.

Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah kebijakan, peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Surat Penugasan: naskah dinas yang dibuat atasan atau pejabat yang berwenang bagi Analis Kebijakan untuk melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan lingkup kajian, analisis, dan advokasi kebijakan.

Laporan Diseminasi Kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja penyebarluasan informasi, pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu.

Laporan Advokasi Kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu.

Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi: dokumentasi yang menginformasikan hasil pertemuan dalam rangka pertukaran pikiran/pengujian materi hasil kajian/analisis/rekomendasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan kebijakan untuk mendapatkan masukan atau kesimpulan atau agenda tindak lanjut kebijakan.

Rancangan Kebijakan: dokumen yang memuat pokok-pokok/substansi dasar kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan tertentu atau kebijakan pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat pengaturan, penetapan, atau pendelegasian wewenang.

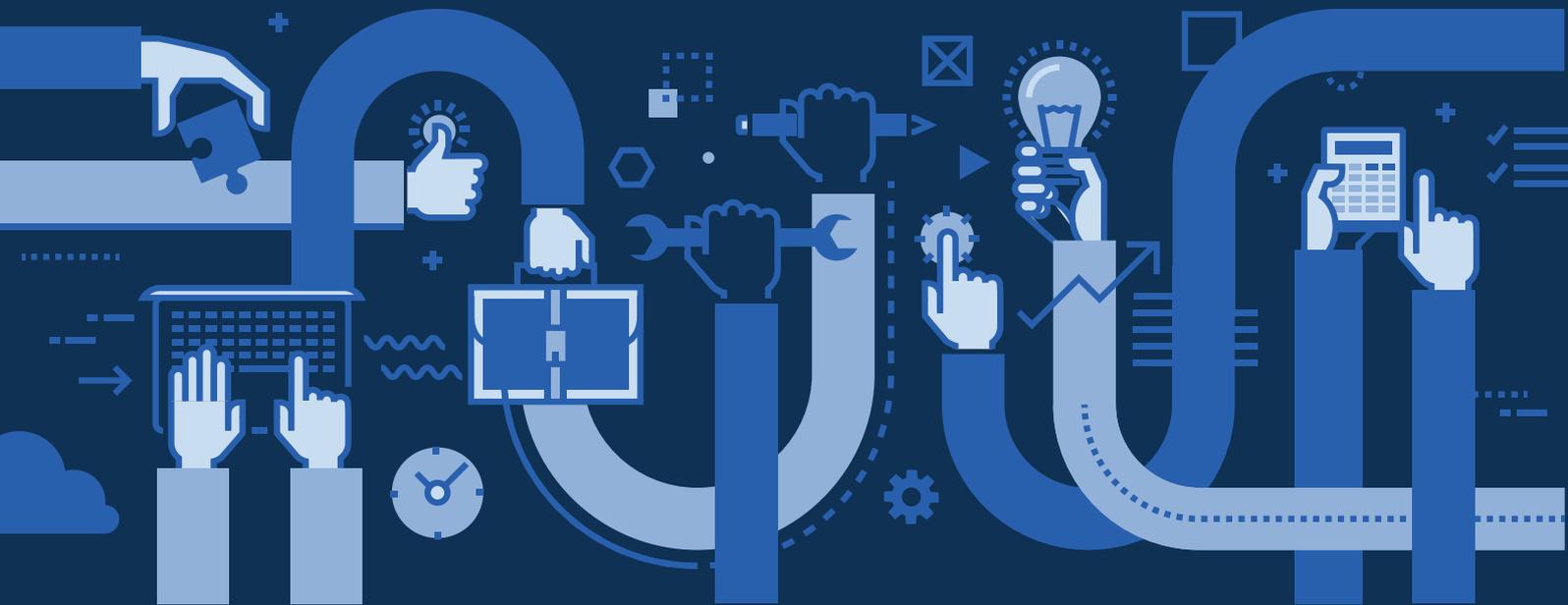
KARYA TULIS ILMIAH

Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum.

Makalah Kebijakan: tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan dengan didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (*output*) yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (*input*) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.



Sedulur Pusaka
(Sistem Pengaduan dan Jalur Komunikasi)
Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan



lan.go.id
pusaka.lan.go.id



Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110



analiskebijakan@gmail.com



Komunitas Analisis Kebijakan



(021)3868201-05, 3455021-5



pusakalan



Whatsapp 081235100050



@Analiskebijakan



Fax: (021) 3800187



Jendela Analisis Kebijakan

ISBN 978-602-52334-5-6 (PDF)



9 786025 233456